

**PEMBERDAYAAN HASIL PERIKANAN MASYARAKAT PESISIR  
PANTAI JAKAT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah(S.E)

**OLEH :**

**ANITA RAMADHANI**  
**NIM 1316130112**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2017 M/ 1438 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Anita Ramadhani, NIM 1316130112 dengan judul "Pemberdayaan Hasil Perikanan Masyarakat Pesisir Pantai Jakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam", Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 17 Mei 2017 M  
20 Sya'ban 1438 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Nurul Hak, MA

Yosy Arisandy, MM

NIP. 19660616-1995031-002

NIP. 19850801-2014032-001





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: JL. Raden Fatah Pagar Dewa Tejp. (0736) 51276,51771 Fax (51771) Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **Pemberdayaan Hasil Perikanan Masyarakat Pesisir Pantai Jakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam**, oleh **Anita Ramadhani NIM. 1316130112**, Program Studi **Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam**, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang **Munawar** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: **Rabu**

Tanggal: **21 Juni 2017 M/26 Ramadhan 1438 H**

Dinyatakan **LULUS** dan telah diperbaiki, dapat diterima, serta disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang **Ekonomi Syariah**, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, **12 Juli 2017 M**

**18 Syawal 1438 H**

**Tim Sidang Munawar**

Ketua

**Dr. Asnaini, MA**

NIP. 19730412 199803 2 003

Penguji I

**Dr. Toha Andiko, M.Ag**

NIP. 19750827 200003 1 001

Sekretaris

**Yosy Arisandy, MM**

NIP. 19850801 201403 2 001

Penguji II

**Eka Sriwahyuni, MM**

NIP. 19770509 200801 2 014

Mengetahui,  
Pti. Dekan

**Dr. Asnaini, MA**

NIP. 19730412 199803 2 003

## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Pemberdayaan Hasil Perikanan Masyarakat Pesisir Pantai Jakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 28 April 2017 M  
1 Sya’ban 1438 H

Mahasiswa Yang Menyatakan



**ANITA RAMADHANI**  
**NIM 131 613 0112**

*MOTTO:*

الْوَقْتُ كَالسَّيْفِ إِنْ لَمْ تَقْطَعْهُ قَطَعَكَ

“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya, menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu”

(H.R. Muslim)

- Kesuksesan datang pada orang yang bergerak cepat ketika yang lain sedang menunggu(Thomas Alva Edison)
- *Patience is needed when you want to achieve a success.*  
(Kesabaran sangat dibutuhkan saat anda ingin mencapai sebuah kesuksesan)
- *Do the best and pray, Allah will take care of the rest.*  
(Lakukan yang terbaik, kemudian berdoa. Allah yang akan mengurus sisanya)



## PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur alhamdulillah selalu terucapkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan ribuan nikmat yang tak terhitung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan sukses. Selanjutnya ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis persembahkan kepada orang-orang tercinta yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan setulus hati, yaitu:

✚ Mamak (Rahayu Ningsih) dan Bapak (Arifin) tersayang, tercinta, malaikat hati yang Selalu menjadi inspirasi, motivator terbaik yang tidak henti-hentinya berdoa, memberikan nita semangat, nasihat, dukungan, kasih sayang dan selalu berjuang untuk kesuksesan Nita.

✚ Adik-adik ku tersayang: Abdul, Aldi, Rahmad, Irfan, Roi dan Nayya yang selalu mampu membakar semangat disaat titik jenuh dan lelah nita.

✚ Mem. Khairiyah Elwardah, M.Ag yang telah hadir membantu, memberi semangat di masa-masa tersulit.

✚ Keluarga Uwak Dalimunthe dan keluarga besar Siantar yang telah banyak membantu nita.

✚ Nopran Syaputra yang hadir dalam hidup ku, mengisi hari-hari, maaf sudah banyak merepotkan dan terimakasih banyak atas bantuan dan semangat yang telah diberikan kepada nita.

✚ Sahabat-sahabat tercinta dan tersayang Siti Badriah, Nena, Rick Ithoncye, Yepi, Widya, Gita, khabib, Bahar, febrin, Elisa, Thiti, Richi, khamzan, Yosi, siska, Uul, shinta, Amir, Dinda, Puji, Pipi, Monika, Alfina dan kak dwi yang telah banyak memberikan suport, motivasi, membantu dan selalu ada untuk Anita.

✚ Teman-teman Ekis 7A yang telah memberikan motivasi dan serta dukungan untukku.

✚ Sahabat & teman-temanku seperjuangan Angkatan tahun 2013

✚ Semua yang telah banyak membantu Anita, Maaf tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.

✚ Agama, Bangsa dan Almamater yang telah menempahku

## ABSTRAK

Pemberdayaan Hasil Perikanan Masyarakat Pesisir Pantai Jakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam oleh Anita Ramadhani NIM 1316130112.

Rumusan permasalahan yaitu: (1) Bagaimana pola pemberdayaan masyarakat pesisir Pantai Jakat, (2) Bagaimana pola pemberdayaan masyarakat pesisir Pantai Jakat perspektif Ekonomi Islam. Tujuan penelitian untuk mengetahui pola pemberdayaan masyarakat pesisir Pantai Jakat dalam perspektif Ekonomi Islam. Jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan terdiri dari nelayan pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan kota Bengkulu. Teknik analisis data meliputi reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil kesimpulan penelitian, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Pantai Jakat melalui dana PUMP dalam fiqih ekonomi Islam merupakan bentuk kerjasama *mudharabah mutlaqah*. Penerapan pemberdayaan tergolong efektif dan sesuai prinsip ekonomi Islam yaitu kepemilikan, keseimbangan dan keadilan. Pemberdayaan tersebut juga sesuai dengan tiga kompleks pemberdayaan umat yaitu kompleks ruhaniah, intelektual dan ekonomi.

*Kata kunci: Pemberdayaan, Masyarakat Pesisir, Pendapatan dan Ekonomi Islam*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Hasil Perikanan Masyarakat Pesisir Pantai Jakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam”. Shalawat berangkaian salam tetap tucurahkan kepada nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti. Amiin.

Penyusunan skripsi bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Enonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M.Ag. M.H, selaku Plt. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Idwal. B, MA selaku Plt. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Drs.Nurul Hak, MA selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi.
5. Yosy Arisandy, MM selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan, pemikiran, motivasi, semangat dengan penuh kesabaran dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Kedua orangtua (Arifin dan Rahayu Ningsih) yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
7. Drs. Parmi Nurdin, SH. MH selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat dan bimbingan menjadikan penulis yang lebih baik, rajin dan semangat.

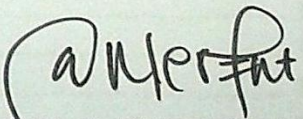


8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dan nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam rangka penulisan skripsi.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmu yang berarti kepada penulis melalui proses belajar mengajar.
11. Rekan-rekan seperjuangan yang telah ikut andil dalam memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 28 April 2017 M

1 Sya'ban 1438 H

  
**ANITA RAMADHANI**  
**NIM 131 613 0112**





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Batasan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Kegunaan Penelitian .....	12
F. Penelitian Terdahulu .....	13
G. Metode Penelitian	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	16
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	16
3. Informan Penelitian .....	17
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	17
5. Teknik Analisis Data .....	19
H. Sistematika Penulisan .....	19

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pemberdayaan .....	21
1. Pengertian Pemberdayaan .....	21
2. Tujuan Pemberdayaan .....	25
3. Konsep Pemberdayaan .....	26
B. Bottom Up dan partisipasi .....	29
C. Ekonomi Islam .....	32
1. Pengertian Ekonomi Islam .....	32

2. Nilai Dasar Ekonomi Islam .....	33
3. Fiqih Ekonomi Islam .....	34
D. Pemberdayaan Ekonomi Islam .....	36
E. Masyarakat Nelayan .....	38
F. Konsep Pendapatan.....	44

### **BAB III GAMBARAN UMUM**

A. Pantai Jakat .....	46
1. Letak Geografis.....	46
2. Profil Pantai Jakat .....	47
B. Keadaan Umum Perikanan Laut .....	48
1. Potensi Sumberdaya Ikan .....	48
2. Unit Penangkapan Ikan .....	49
C. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir .....	50
1. Sejarah Program PEMP .....	50
2. Program PEMP .....	51
3. Model Strategi Pemberdayaan Pantai Jakat .....	52

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	60
1. Program Pemberdayaan Dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu .....	60
2. Kelompok Usaha Bersama (KUB) .....	66
B. Pembahasan .....	72
1. Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Jakat ....	72
2. Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Jakat Perspektif Ekonomi Islam .....	82

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	95

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## **DAFTAR TABEL**

<b>TABEL</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Perbedaan Perencanaan Top Down dengan Bottom Up .....	29
3.1 Perbatasan Pantai Jakat .....	46
3.1 Penerimaan Dana PUMP .....	58
4.1 Penerapan Rencana Usaha KUB .....	74
4.2 Laporan Perkembangan Usaha KUB Rezeki Bahari .....	75
4.3 Laporan Perkembangan Usaha KUB Zakat Makmur .....	76
4.4 Laporan Perkembangan Usaha KUB Nelayan Muda Mandiri .....	76

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
3.2 Skema Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir .....	55



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1** Daftar Singkatan
- Lampiran 2** Blangko Judul
- Lampiran 3** Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 4** Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 5** SK Pembimbing
- Lampiran 6** Pedoman Wawancara
- Lampiran 7** Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 8** Surat Rekomendasi DMPTSP Provinsi Bengkulu
- Lampiran 9** Surat Izin Penelitian DMPTSP Kota Bengkulu
- Lampiran 10** Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 11** Catatan Perbaikan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 12** Dokumentasi Penelitian

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki potensi sumber daya laut dan pantai yang sangat besar. Kekayaan alam Indonesia tersebut dibuktikan dengan berbagai ragam sumber daya hayati pesisir yang bervariasi seperti terumbu karang, rumput laut, hutan mangrove, ikan yang berlimpah serta sumber daya yang tidak dapat diperbarui, misalnya minyak bumi dan bahan tambang lainnya.<sup>1</sup>

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat yang memiliki panjang pantai 95.181 km dengan luas perairan 5.8 juta km<sup>2</sup> kaya akan sumber daya laut dan ikan.<sup>2</sup>

Besarnya potensi kelautan ternyata tidak diikuti oleh kesejahteraan masyarakat nelayan. Problem yang terlihat pada kondisi sosial ekonomi nelayan kita sangat jauh berbeda dengan potensi sumberdaya alamnya. Dalam kenyataannya kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial (khususnya dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehatan) dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain.

Pada hakikatnya masyarakat nelayan identik dengan masyarakat yang miskin. Kusnadi dalam bukunya *Akar Kemiskinan Nelayan*, secara faktual ada

---

<sup>1</sup>Kanisius, *Tambak Air Payau Budidaya Udang Dan Bandeng*, (Yogyakarta: IKAPI, 1998), h. 9

<sup>2</sup>Apridar, *Ekonomi Kelautan dan Pesisir*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 21

dua faktor yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat nelayan, yaitu faktor *alamiah* dan *non alamiah*. Faktor *alamiah* disebabkan karena *fluktuasi* musim tangkap ikan dan struktur *alamiah* sumberdaya ekonomi desa. Sementara faktor *non alamiah* berhubungan dengan keterbatasan daya jangkau teknologi penangkapan ikan, ketimpangan dalam sistem bagi hasil dan tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja, lemahnya penguasaan jaringan pemasaran hasil tangkapan dan belum berfungsinya koperasi nelayan yang ada.<sup>3</sup>

Kemiskinan yang selalu menjadi “*trade-mark*” bagi nelayan dalam beberapa hal dibenarkan dengan beberapa fakta seperti kondisi pemukiman yang kumuh, tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah, rentannya mereka terhadap perubahan-perubahan sosial, politik dan ekonomi yang melanda, hal tersebut juga terlihat dari hasil tangkapan laut yang kurang maksimal, alat tangkap ikan yang kurang memadai, tempat penjualan atau tempat pelelangan ikan kurang menjanjikan, kurang perhatiannya aparat keamanan terhadap masuknya kapal *trawl* atau kapal yang menggunakan alat tangkap berupa pukat harimau serta ketidakberdayaan mereka terhadap intervensi modal dan penguasa yang datang.<sup>4</sup>

Provinsi Bengkulu memiliki potensi yang cukup besar pada substansi sektor perikanan, terutama perikanan laut. Letak wilayah yang sebagian besar menghadap ke Samudera Hindia dengan panjang pantai mencapai 523km, menyebabkan Provinsi Bengkulu memiliki luas laut teritorial sebesar

---

<sup>3</sup> Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, (Jakarta: LKIS, 2006), h.23

<sup>4</sup>Supriadi dan Alimuddin., *Hukum Perikanan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 200



53.000km<sup>2</sup> dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE jarak 12-200mil laut dari pantai) mencapai 685.000km<sup>2</sup>.<sup>5</sup>

Pantai Jakat secara geografis letaknya berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan memiliki taman bawah laut yang berbukit-bukit, membuat besarnya potensi komoditas perikanan yang melimpah menjadi harapan tulang punggung ekonomi sebagian mata pencarian penduduk di wilayah pesisir Pantai Jakat.<sup>6</sup>

Sumber ikan yang menjadi mata pencarian sekitar 200KK penduduk asli Bengkulu. Sumber daya kelautan yang apabila dikembangkan secara optimal akan menjadi potensi ekonomi yang menjanjikan masa depan. Namun kenyataannya, pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir belum optimal karena konsentrasi pembangunan desa pantai kurang mendapatkan perhatian lebih, sehingga masyarakat pesisir merupakan masyarakat tertinggal dan masuk kategori kurang berdaya (miskin).

Daerah Pesisir Pantai Jakat kota Bengkulu dinilai memiliki potensi sumber daya kelautan dapat dijadikan andalan pembangunan daerah. Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan agar masyarakat pesisir pantai Jakat dapat terlepas dari jeratan kemiskinan, kenyataannya belum membawa hasil yang optimal sesuai dengan tujuan utama program pembangunan desa pantai.

---

<sup>5</sup>Redaksi, *Potensi Perikanan Provinsi Bengkulu*, <http://bengkuluprov.go.id/potensi/perikanan>, diposting 16 april 2014, dikutip pada tanggal 23 Mei 2016 pukul 19.14 wib.

<sup>6</sup>Yasrizal, *Nelayan Pantai Zakat Keluhkan Kapal Trawl*, <http://kupasbengkulu.com/nelayan-pantai-jakat-keluhkan-kapal-trawl>, diposting 15 juni 2014, dikutip pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 21.00 wib

Kehidupan nelayan khususnya masyarakat pesisir Pantai Jakat sangat memprihatinkan, mereka adalah nelayan tradisional yang memakai perahu motor dan alat-alat tangkap sederhana. Nelayan Pesisir Pantai Jakat adalah buruh nelayan dan nelayan tradisional individu maupun kelompok yang tidak memiliki alat produksi yang memadai. Untuk meningkatkan pendapatan dan kemakmuran keluarga nelayan baik nelayan tradisional maupun buruh nelayan haruslah diberi kesempatan untuk memiliki sarana dan peralatan penangkapan yang modern dan efektif.

Pada umumnya nelayan Pantai Jakat masih mengalami ketergantungan dan keterbatasan terhadap teknologi penangkapan, hal tersebut sangat tinggi. Dengan alat tangkap sederhana, wilayah operasinya menjadi terbatas, hanya di sekitar perairan pantai. Ketergantungan terhadap musim juga sangat tinggi, sehingga tidak setiap saat nelayan bisa turun melaut, terutama saat musim ombak yang bisa berlangsung sampai lebih dari satu bulan. Akibatnya dengan keterbatasan modal, kesederhanaan alat tangkap yang dimiliki, pada musim tertentu tidak ada tangkapan yang bisa diperoleh. Kondisi tersebut merugikan nelayan karena secara riil rata-rata pendapatan perbulan menjadi lebih kecil dan pendapatan yang diperoleh pada saat musim ikan akan habis dikonsumsi pada saat paceklik.

Permasalahan lain yang dihadapi masyarakat nelayan adalah yang terkait dengan produksi merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh nelayan selain masalah pemasaran, alat tangkap dan modal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, nelayan berusaha melakukan terobosan untuk

meningkatkan pendapatan dengan cara mengandalkan tengkulak ataupun tauke untuk memasarkan hasil tangkapnya dan meminjam uang kepada pemilik modal untuk pengadaan alat tangkap. Akan tetapi, berbagai upaya yang dilakukan oleh nelayan untuk meningkatkan kesejahteraannya telah menjebak mereka dalam ketergantungan dengan pihak lain sekaligus menempatkan pada posisi lemah.

Menurut pak Yanto salah satu nelayan Pantai Jakat kota Bengkulu, “rendahnya pendapatan hasil penangkapan ikan yang terkadang sampai 4 hari tidak mendapatkan hasil. Pasalnya, hal ini terjadi sejak beroperasinya kapal *trawl* yang sangat merugikan nelayan kecil dengan infrastruktur yang terbatas, modal yang minim, serta masih menggunakan jaring tradisional. Pihak pemerintah sendiri hanya membantu memberikan jaring 2 (dua) tahun sekali, dan hasil tangkap mereka belum adanya pemberdayaan hanya di jual kepada tengkulak.”<sup>7</sup>

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat kompleks dan multidimensional, baik dilihat dari aspek kultural maupun aspek struktural. Ada empat masalah pokok yang menjadi penyebab dari kemiskinan,<sup>8</sup> yaitu kurangnya kesempatan (*lack of opportunity*), rendahnya kemampuan (*low of capabilities*), kurangnya jaminan (*low level-security*) dan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi dan politik sehingga menyebabkan kerentanan (*vulnerability*), keterpurukan (*voicelessness*) dan ketidakberdayaan (*powerlessness*) dalam segala bidang.

---

<sup>7</sup>Yanto, Nelayan, wawancara pada tanggal 23 Maret 2016 pukul 17.10 wib

<sup>8</sup>Mulyadi S, *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.51



Contoh dari keempat hal tersebut dapat dilihat dari masalah kemiskinan struktural yang terjadi pada masyarakat pesisir Pantai Jakat, dimana faktor-faktor yang menjadi penyebab pada dasarnya dikelompokkan atas: (1) masalah yang berkaitan dengan kepemilikan alat tangkap atau lebih tegasnya perahu bermotor; (2) akses terhadap modal khususnya menyangkut persyaratan kredit; (3) persyaratan pertukaran hasil tangkapan yang tidak berpihak pada buruh nelayan; (4) sarana penyimpanan ikan; (5) hak pengusahaan kawasan tangkap; dan (6) perusakan sistem organisasi masyarakat pesisir.

Banyak kasus pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan menjadikan masyarakat nelayan sebagai objek. Hal tersebut dilakukan misalnya dalam bentuk pemberian bantuan (yang sebenarnya adalah pinjaman yang harus dibayar oleh nelayan) alat tangkap yang tidak mengacu pada kebutuhan nelayan, melainkan merupakan paket yang sudah ditentukan dari atas dan cenderung seragam antar berbagai daerah. Dengan sistem bantuan yang sifatnya *top down*, mengakibatkan alat bantuan tidak efektif. Seharusnya, jenis bantuan itu tidak semata-mata ditentukan dari atas, melainkan didasarkan atas dialog dengan masyarakat setempat. Dengan cara demikian, nelayan diposisikan sebagai subjek dalam pembangunan perikanan sehingga jenis bantuan yang diberikan akan betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan oleh nelayan.

Menurut pak Nano salah satu nelayan Pasar Baru, penangkapan ikan yang menjadi sumber pencarian mereka mulai merasa resah terhadap akan adanya *trawl* bahkan kapal apolo yang paling bahaya karena dapat menjaring sampai mengangkat terumbu karang. Pada hal pemerintah telah melarang,

bahkan kapal *trawl* beserta awak kapal yang beroperasi ditangkap oleh aparat terkait, tidak ada efek jera terhadap tindakan tersebut. Beliau pun tidak mengelak bahwa pemerintah membantu segi pemodalannya pada jaring dan mesin dua tahun sekali dengan syarat mengajukan proposal, namun hal itu tidak dibagi secara merata ada unsur *nepotisme* didalamnya. Dalam program pemberdayaan pada hasil perikanan dibidang masih jauh, karena bantuan yang didapat terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan serta hasil tangkapan mereka dijual ke tengkulak.<sup>9</sup>

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menyeleksi puluhan kelompok nelayan yang mengajukan usulan penerimaan program bantuan nelayan. Program ini terbagi tiga; yakni bantuan alat pengolahan, budidaya dan perikanan tangkap. Dipastikan tidak semua kelompok nelayan mendapatkan bantuan, karena anggaran dana terbatas. Maka perlu dilakukan verifikasi dengan ketat kepada kelompok nelayan yang sudah mengajukan proposal, sehingga kualifikasi kelompok nelayan diprioritaskan kepada yang belum mendapatkan bantuan kurun waktu 2 tahun terakhir. Output yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kota melalui program ini adalah terciptanya peningkatan produksi perikanan, baik perikanan air tawar maupun perikanan tangkap air laut.<sup>10</sup>

Menurut Imang Mansur Burhan sebagaimana dikutip oleh Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam bukunya Pengembangan Masyarakat Islam<sup>11</sup> mendefinisikan pemberdayaan umat atau masyarakat sebagai upaya membangkitkan potensi umat Islam kearah yang lebih baik, baik dalam kehidupan sosial politik maupun ekonomi.

---

<sup>9</sup>Nano, Nelayan, wawancarapada tanggal 23 Maret 2016 pukul 17.30 wib

<sup>10</sup>Redaksi, *Dkp Kota Seleksi Kelompok Nelayan*, <http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2015/09/16/dkp-kota-seleksi-kelompok-nelayan>, diposting 16 September 2015, dikutip pada tanggal 23 Mei 2016 pukul 19.14 wib.

<sup>11</sup>Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), h.42

Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena didalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat. Dengan demikian program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir haruslah dirancang sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dan antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya. Pemberdayaan masyarakat nelayan haruslah bersifat *bottom up* dan *open menu*, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran.

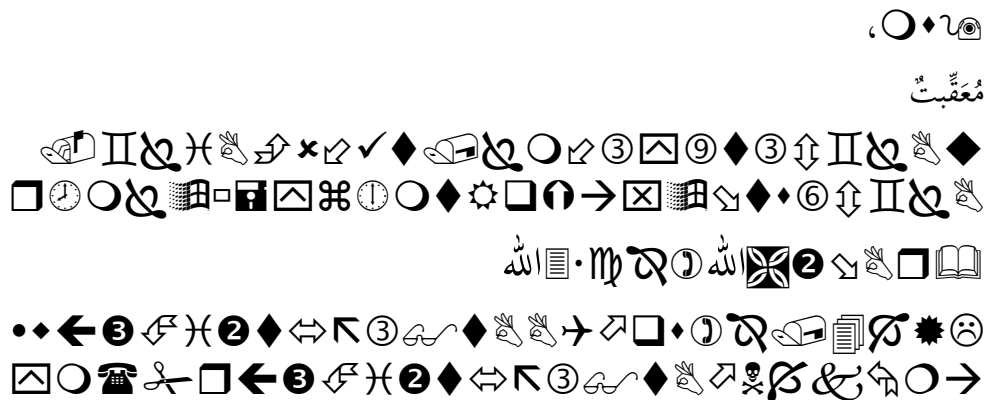
Demi menggarap potensi laut Bengkulu secara maksimal, Dinas Kelautan dan Perikanan kota Bengkulu membuat kebijakan program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat Pantai Jakat yaitu program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dengan menggunakan dana PUMP dari Kementerian dan Kelautan. Bantuan tersebut diberikan kepada nelayan yang bergabung pada Kelompok Usaha Bersama (KUB), sehingga selain dapat meningkatkan kesejahteraan juga mendidik mereka lebih mandiri, bekerja dan memiliki kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam rangka pelaksanaan metode pemberdayaan perlu adanya kerjasama dan koordinasi antar pelaksana pembangunan yaitu masyarakat pesisir, pemerintah daerah, lembaga keuangan dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Oleh karena itu, keberhasilan program PEMP sangat dipengaruhi oleh berjalan atau tidaknya sistem kelembagaan yang melibatkan

semua pihak. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya.

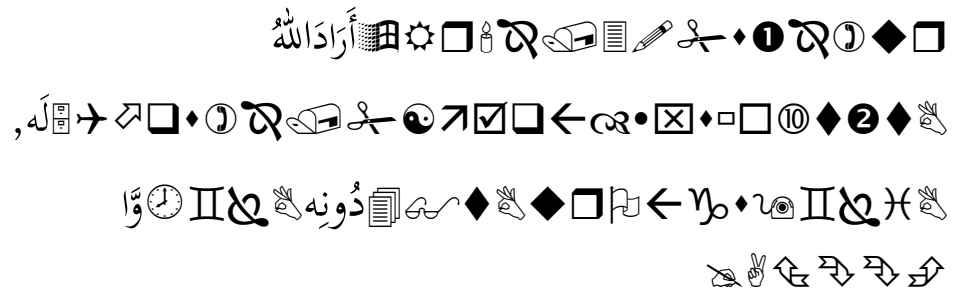
Islam mewajibkan umatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja keras untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Islam juga memberikan aturan-aturan agar orang yang berusaha berdaya dibidang ekonomi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, meliputi: berimbang, realistis, berkeadilan, tanggung jawab, mencukupi dan berfokus pada manusia sesuai dengan haknya sebagai khalifah di muka bumi. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi dalam Islam adalah adanya kesempatan semua anggota masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan, sehingga semua orang dapat merasakan nikmat dan karunia Allah Swt.<sup>12</sup>

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah yang menyuruh manusia untuk selalu berusaha dalam menghadapi masalah hidup sebagai masalah pengembangan dan pemberdayaan umat Islam khususnya, sebagaimana firman Allah Q.S Ar-rad ayat 11 yang berbunyi:



<sup>12</sup>Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 299





Artinya: *Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*<sup>13</sup>

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyuruh atau mengajak kita agar mau berusaha dalam menghadapi permasalahan yang ada, tidak lengah dan mudah putus asa. Dengan ini diharapkan masyarakat nelayan mampu untuk berusaha hidup agar lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dalam konsep pemberdayaan, lebih dititik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan, investasi dan sebagainya) juga ada faktor non ekonomi.

Rasulullah Saw telah memberikan satu cara dalam menangani persoalan kemiskinan. Konsep pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah Saw mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititik beratkan pada menghapus penyebab kemiskinan, bukan pada penghapusan kemiskinan semata, seperti halnya dengan memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya

---

<sup>13</sup>Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), h. 315

sementara (*temporer*). Demikian pula, didalam mengatasi problematika tersebut, Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakyat biasa mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan sesuatu yang dimilikinya sesuai dengan keahliannya. Rasulullah memberi tuntunan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji dalam menciptakan kesejahteraan.<sup>14</sup> Konsep pemberdayaan dalam Islam adalah bersifat menyeluruh (*holistik*) menyangkut berbagai aspek dan sendi-sendi dasar kehidupan.

Melihat kondisi ekonomi masyarakat pesisir dengan berbagai program pemberdayaan yang telah diterapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kota Bengkulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Hasil Perikanan Masyarakat Pesisir Pantai Jakat dalam Meningkatkan Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pemberdayaan hasil perikanan masyarakat pesisir Pantai Jakat ?
2. Bagaimana efektivitas pemberdayaan hasil perikanan masyarakat pesisir Pantai Jakat dalam perspektif ekonomi Islam ?

---

<sup>14</sup>Mustafa Kamal , *Bisnis Ala Nabi: Teladan Rasulullah Saw Dalam Bisnis*, (Yogyakarta: PT. Bintang Pustaka, 2013), h. 219-220

### **C. Batasan Masalah**

Menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian, maka sangat diperlukan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian adalah Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Jakat melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dengan Bantuan Dana PUMP yang diterima Nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB).

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas pemberdayaan hasil perikanan masyarakat pesisir Pantai Jakat.
2. Untuk mengetahui efektivitas pemberdayaan hasil perikanan masyarakat pesisir Pantai Jakat dalam perspektif Ekonomi Islam.

### **E. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi gambaran tentang pola pemberdayaan hasil perikanan masyarakat pesisir. Selain itu diharapkan dapat menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya, bermanfaat secara teori dan aplikasi dalam rangka mengembangkan pengetahuan tentang pemberdayaan hasil perikanan terhadap peningkatan pendapatan perspektif Ekonomi Islam.

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Masyarakat Pesisir adalah untuk memberikan masukan dan sebagai wadah sosialisasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan

masyarakat pesisir dalam memperoleh bantuan dari segi material maupun non materi untuk memajukan tingkat pendapatan masyarakat pesisir khususnya masyarakat di Pantai Jakat Bengkulu.

- b. Bagi Pemerintah, Dinas Kelautan dan Perikanan kota Bengkulu adalah sebagai sumbangan pemikiran masyarakat mengenai pemberdayaan hasil perikanan terhadap peningkatan pendapatan. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan instansi lainnya dalam merumuskan, menerapkan kebijakan serta kepedulian terhadap masyarakat pesisir dalam pola pemberdayaan perikanan mereka.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian sebelumnya, yaitu:

Mukhoffifatus Syafa'ah, "*Peranan Kelompok Tani Tambak Dewi Mina jaya Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim Di Desa Margo Mulyo Tayupati*", pada tahun 2015.<sup>15</sup> Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian termasuk dalam penelitian kasus dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model analisis *interaktif Miles* dan *Huberman* yang terdiri atas 4 tahapan yaitu: Tahap pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan diantaranya: Peran atau sumbangsih Kelompok Tani Tambak Dewi Mina Jaya dalam upaya

---

<sup>15</sup>Mukhoffifatus Syafah, "Peranan Kelompok Tani Tambak Dewi Mina Jaya Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim Di Desa Margo Mulyo Tayupati", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015



meningkatkan kesejahteraan masyarakat (anggota) adalah dengan mengadakan kegiatan pemberdayaan ekonomi diantaranya pertemuan rutin, pelatihan keterampilan serta dari segi permodalan agar para anggota mampu mengembangkan usahanya. Faktor pendukung diantaranya, kesamaan tempat tinggal dan profesi, program simpan pinjam, serta motivasi anggota dalam mengembangkan usahanya dan menambah penghasilan. Faktor penghambat dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Tambak Dewi Mina Jaya diantaranya adalah rasa malas. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, pola penerapan pemberdayaan masyarakat pesisir itu sendiri.

Razak miraza, "*Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat*", 2009.<sup>16</sup> Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan data yang diperoleh dari data primer yaitu kuesioner dan wawancara mendalam dijelaskan secara kualitatif. Hasil penelitiannya bahwa program PEMP belum tepat sasaran, dana yang didapat hanya sebagian kecil saja yang dibelikan peralatan maupun kepentingan perikanan. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan penerapan pemberdayaan itu sendiri terhadap pendapatan.

Sarjulis, "*Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam (1970-2009)*", pada tahun 2011.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi,

---

<sup>16</sup>Razak Miraza, "Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Sumatera Utara, 2009

<sup>17</sup>Sarjulis, "Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam (1970-2009)", *Skripsi*, Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang, 2011

historiografi. Hasil penelitian bahwa keadaan sosial ekonomi Nelayan Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara tidak jauh berbeda dengan nelayan lain yang ada di Padang tergolong miskin serta kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh instansi terkait belum maksimal. Perbedaannya adalah bahwa tidak hanya membahas tentang kehidupan sosial ekonomi masyarakat, namun peneliti lebih menekankan pada penerapan pemberdayaan.

Yuniar Mustikaningrum, "*Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dalam Pengolahan Hasil Ikan Di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Sidoarjo*", 2014.<sup>18</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa hasil pemberdayaan usaha kecil dalam pengolahan dari hasil ikan pada Desa Tambak Oso dilakukan melalui pengembangan produksi dan pengadaan sarana-prasarana untuk pelaku usaha kecil sangat dirasakan oleh usaha kecil menengah. Perbedaannya terletak pada penerapan program pemberdayaan penelitian terdahulu fokus kepada UKM sedangkan pada penelitian ini fokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir Pantai Jakat yang bergabung dalam nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Dalam beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu lebih menekankan terhadap pengaruh pemberdayaan terhadap kesejahteraan, serta kehidupan sosial ekonominya, namun penelitian ini lebih memfokuskan pada penerapan dan efektivitas pemberdayaan hasil

---

<sup>18</sup>Yuniar Mustikaningrum, "*Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dalam Pengolahan Hasil Ikan Di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Sidoarjo*", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2014

perikanan masyarakat pesisir pada nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam meningkatkan pendapatan perspektif ekonomi Islam.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian studi lapangan atau *field reaseach*.<sup>19</sup> Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut peneliti, penelitian ini lebih mengacu pada pelaksanaan dan pola pemberdayaan masyarakat pesisir sehingga dengan alasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa jenis penelitian lapangan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

### **2. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

#### **a. Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan mulai Agustus 2016 sampai Juni 2017.

#### **b. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Pantai Jakat kota Bengkulu. Lokasi dipilih berdasarkan pengamatan bahwa masyarakat Pantai Jakat yang heterogen mata pencahariannya tetapi mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan banyak melakukan praktek-praktek perekonomian. Pada lokasi juga terdapat pemberdayaan yang diterapkan kepada nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Hal inilah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian.

---

<sup>19</sup>Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 180

### 3. Informan Penelitian

Dalam penelitian, informan dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu informan sengaja dipilih dengan maksud dan tujuan akan mewakili atas permasalahan yang diteliti.<sup>20</sup> Adapun informan yang dipilih berjumlah 15 orang, yang terdiri dari masyarakat pesisir Pantai Jakat nelayan yang tergabung dalam beberapa kelompok usaha bersama (KUB) yang mendapatkan bantuan dari pemerintah serta informan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan kota Bengkulu.

### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, data ini didapat dari sumber pertama dari individu atau perorangan.<sup>21</sup> Penelitian ini menggunakan data primer karena objek data yang berupa wawancara langsung kepada masyarakat pesisir Pantai Jakat (nelayan KUB) serta pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.

#### b. Data sekunder

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder karena data diperoleh dari jurnal, dokumen, buku-buku, data kelurahan dan pedoman umum PEMP dari Direktorat PMP DKP mengenai konsep

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.85

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 133

Program PEMP, pemberdayaan, pemberdayaan Ekonomi Islam dan pendapatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>22</sup> Observasi dilakukan peneliti melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara terstruktur yang dilakukan secara langsung dengan para nelayan, masyarakat pesisir sekitar Pantai Jakat (nelayan KUB), serta pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan kota Bengkulu untuk mengetahui pola pemberdayaan hasil perikanan Pantai Jakat.

c. Dokumentasi

Data hasil penelitian juga dikumpulkan melalui pengkajian dokumen. Dokumen yang relevan dengan masalah penelitian. Metode ini digunakan untuk menggali data yang mengandung petunjuk-petunjuk tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian.

---

<sup>22</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009) . h. 70



## 5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian, teknik analisis yang dipakai adalah teknik analisa data lapangan model *Miles and Huberman*, yang mana analisa data dalam penelitian, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban hasil wawancara. Menurut *Miles and Huberman*, aktivitas dalam menganalisa data terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusions drawing or verifying*.<sup>23</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian tersebut terdiri dari lima yang terbagi atas sub-bab dengan perincian sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan** meliputi Latar Belakang Masalah yang akan memberikan penjelasan tentang penelitian perlu dilakukan. Rumusan Masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah. Batasan Masalah untuk menghindari kesalahpahaman dan agar lebih fokus. Selanjutnya Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi pada penelitian. Penelitian Terdahulu untuk menjadi rujukan dan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Metode Penelitian menjelaskan metode yang dipakai dalam penelitian dan terakhir menyusun Sistematika Penulisan.

---

<sup>23</sup>Sugiyono, "*Metode Penelitian*, ... h. 246

**BAB II Landasan Teori**, merupakan penelusuran beberapa teori-teori yang relevan dengan tema yang terkait dengan penelitian. Dalam Kajian Teori meliputi teori tentang; Pengertian Pemberdayaan, Tujuan Pemberdayaan, Konsep Pemberdayaan, *Bottom-Up* dan Partisipasi, Ekonomi Islam, Fiqh Ekonomi Islam, Pemberdayaan Ekonomi Islam, Masyarakat Nelayan dan Konsep Pendapatan.

**BAB III Gambaran Umum** yaitu bagian yang membahas tentang gambaran umum tentang keadaan umum objek penelitian mencakup gambaran umum profil Pantai Jakat; Letak Geografis, Kondisi Pantai Jakat dan Kondisi perekonomian Masyarakat Pesisir Pantai Jakat. Keadaan umum perikanan laut; Potensi Sumberdaya Ikan, Unit Penangkapan Ikan dan program pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Jakat di Bengkulu.

**BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan** yang meliputi: jawaban dari permasalahan dan rumusan masalah yang ada meliputi; efektivitas pemberdayaan hasil perikanan masyarakat pesisir Pantai Jakat dan efektivitas pemberdayaan hasil perikanan masyarakat pesisir Pantai Jakat dalam perspektif Ekonomi Islam.

**BAB V Penutup**, mencakup kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan peneliti serta sebagai jawaban atas pokok permasalahan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pemberdayaan

##### 1. Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.<sup>24</sup>

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empoworment*) berasal kata “*Power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan. Bahkan dalam dua istilah ini dalam batas-batas tertentu bersifat *interchangeable* atau dapat dipertukarkan.<sup>25</sup>

Pemberdayaan menurut Mc Ardle yang dikutip dari Harry Hikmat<sup>26</sup> mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi

---

<sup>24</sup>Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gaya Gava Media,2004), h. 77

<sup>25</sup>Nani Machendrawaty,dkk., *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), h. 41-42

<sup>26</sup>Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*,(Bandung : Humaniora Utama Press, 2010), h. 3

pengetahuan, keterampilan dan sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal. Namun demikian, Mc Ardle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.

Istilah keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu-individu lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.<sup>27</sup>

Faktor-faktor determinan yang mempengaruhi proses pemberdayaan antara lain; perubahan sistem sosial yang diperlukan sebelum pemberdayaan yang sebenarnya dimungkinkan terjadi. Karena itu, perubahan struktur sosial masyarakat dalam sistem sosial menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.<sup>28</sup>

Jika dilihat dari proses operasionalnya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan antara lain: pertama, kecenderungan

---

<sup>27</sup> Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, (Bandung : Alfabeta, 2007), h. 1

<sup>28</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : PT. Retika Adhitama, 2005), h. 60

primer yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Pada proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik *ekstrem*) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu.<sup>29</sup>

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*) disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena yang demikian itu akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang

---

<sup>29</sup> Supriadi, Alimuddin., *Hukum Perikanan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.150

dimiliki masyarakat (*empowering*), dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi. Ketiga, memberdayakan mengandung arti melindungi. Perlindungan dan pemihakkan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi artinya mengisolasi dari interaksi, melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*) karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan dari usaha sendiri, dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.<sup>30</sup>

Berdasarkan paparan sederhana di atas, proses pengembangan atau pemberdayaan merupakan upaya memampukan, memandirikan masyarakat dan pada akhirnya akan menyediakan sebuah ruang kepada

---

<sup>30</sup> Doli, *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 138



masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang mempunyai kualitas.

## 2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu<sup>31</sup> masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan *kognitif*, *konatif*, *psikomotorik* dan *afektif* dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal

---

<sup>31</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat* (Bandung : PT. Retika Adhitama, 2005), h. 60

masyarakat tersebut. Tujuan pemberdayaan bagi masyarakat memberikan kesempatan pengembangan dan pembangunan kesejahteraan hidup terciptanya lapangan kerja dan kemandirian dalam membangun kehidupan yang layak dan cukup bagi warga negara dengan kehidupan perekonomian berkembang.<sup>32</sup>

Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan utama pembangunan terkait dengan teori sumber daya manusia yang memandang mutu penduduk sebagai kunci utama pembangunan. Banyaknya penduduk bukan beban suatu bangsa bila mutunya tinggi, untuk itu pembangunan hakekat manusiawi hendaknya menjadi arah pembangunan dan perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan kewiraswastaan. *Human capital teory*, menekankan bahwa manusia merupakan sumber daya utama, berperan sebagai subjek baik dalam upaya peningkatan taraf hidup dirinya maupun dalam melestarikan dan memanfaatkan lingkungannya. Menurut teori ini, konsep-konsep pendidikan harus didasarkan pada anggapan bahwa modal yang dimiliki manusia itu terdapat pada dirinya sendiri, berupa sikap, pengetahuan, ketrampilan dan aspirasi.<sup>33</sup>

### **3. Konsep Pemberdayaan**

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan

---

<sup>32</sup>Eko Widodo, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015),h. 203

<sup>33</sup> Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, (Bandung : Alfabeta, 2007), h. 3-4

tingkat individu dan sosial. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Sebaiknya, orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan berpartisipasinya.<sup>34</sup>

Tiga parameter indikator keberdayaan masyarakat, yaitu: 1) Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power with*), 2) Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power to*), 3) Tingkat kemampuan membangun kerjasama dan solidaritas.<sup>35</sup> Secara konseptual tiga parameter ini tersusun secara *gradual parameter power with* merupakan parameter paling tinggi tingkatannya dibandingkan dengan parameter lainnya. Konsep pemberdayaan masyarakat menetapkan kaidah bahwa program memberdayakan masyarakat baru dianggap berhasil ketika program tersebut mampu mewujudkan *power with* pada kelompok sasaran. Indikator *power with* menggambarkan kondisi ketika kelompok sasaran pemberdayaan mampu mengembangkan potensi keberdayaannya sendiri tetapi juga mampu memberdayakan orang atau keluarga lain di komunitasnya.

---

<sup>34</sup> Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, ..., h. 5

<sup>35</sup> Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 67

Konsep pemberdayaan masyarakat mempunyai berbagai definisi, salah satunya adalah menurut Paine yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya, ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.<sup>36</sup> Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki, melalui transfer daya dari lingkungannya.

Dalam kaitan dengan definisi diatas, midgley menekankan bahwa kondisi kesejahteraan sosial terdiri dari tiga elemen utama, yaitu: pertama, tingkatan dimana suatu masalah dapat dikelola; kedua, sejauh mana kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dan ketiga, tingkatan dimana kesempatan untuk mengembangkan diri disediakan ataupun difasilitasi oleh pemerintah.<sup>37</sup>

## **B. *Bottom-up* dan Partisipasi**

Dalam suatu proses perencanaan pembangunan dibutuhkan suatu pendekatan perencanaan yang digunakan sebagai pengambil keputusan serta menunjukkan bagaimana proses perencanaan tersebut dilakukan hingga muncul suatu pengambilan keputusan pada produk rencana. Pendekatan

---

<sup>36</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat sebagai upaya pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.206

<sup>37</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*,...,h. 68

perencanaan yang dimaksud adalah pendekatan secara *top down* dan *bottom up*.

Dalam kaitan pemberdayaan masyarakat pesisir beberapa faktor harus diperhatikan misalnya kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Untuk alternatif yang diberikan adalah pemberdayaan masyarakat dengan kerangka pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis komunitas (*community based fishing system management*). Secara konseptual, terdapat perbedaan yang cukup mendasar dari kedua tipe perencanaan pembangunan ini, seperti berikut:

**Tabel 2.1**

**Perbedaan Perencanaan *Bottom Up* dan *Top Down***

<b>Top Down</b>	<b>Bottom Up</b>
<p><i>Top down planning</i> adalah model perencanaan yang dilakukan dari atasan yang ditujukan kepada bawahannya dimana yang mengambil keputusan adalah atasan sedangkan bawahan hanya sebagai pelaksana saja. Dalam pengertian lain terkait dengan pemerintahan, <i>perencanaan top down planning</i> atau perencanaan atas adalah perencanaan yang dibuat oleh pemerintah ditujukan kepada masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaksana saja.</p> <p>Dari atas ke bawah (<i>top-down</i>). Pendekatan ini mendesak bagian bawah bekerja sesuai kemauan atasan di dalam perencanaan tanpa memedulikan situasi nyata bagian bawah. Waktu perencanaan bisa sangat pendek, tetapi ada banyak hal yang terlewatkan karena sempitnya forum informasi dan komunikasi.</p>	<p><i>Bottom Up Planning</i> adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian dibidang pemerintahan, <i>bottom up planning</i> atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator.</p>

Program-program pemerintah yang telah dilakukan belum mendapatkan hasil yang maksimal dikarenakan kurangnya melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Proses pembangunan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Pendekatan pembangunan selama ini adalah *top down approach*.

Model pendekatan *top down approach* bersifat sentralistik. Tidak saja dana pembangunan tetapi juga perencanaan pembangunan ditentukan dari atas (pemerintah). Berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat dirumuskan dari dan oleh orang luar tanpa melibatkan masyarakat. Dalam model ini masyarakat ditempatkan sebagai objek yang akan menerima dan menikmati hasil. Posisi sentral yang mendominasi proses pembangunan ternyata dapat menimbulkan hubungan yang timpang disatu pihak lahir budaya “perintah” dikalangan pelaksana, di lain pihak akan lahir sikap diam dan menunggu.

Pendekatan pembangunan bergeser menjadi pendekatan *bottom up approach*. Dalam pemberdayaan masyarakat, pendekatan *bottom up* menjadi titik tolak, masyarakat dilibatkan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi program yang akan dilaksanakan.

Pendekatan *strategybottom up* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator.

Sedangkan dalam pengertian dibidang pemerintahan, *bottom-up planning* atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator.<sup>38</sup> Dari bawah ke atas (*bottom-up*). Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya.

Pendekatan *bottom up* atau lebih sering disebut pendekatan partisipatif adalah proses penyusunan, perencanaan pembangunan oleh pemerintah bersama lembaga kemasyarakatan dan melibatkan berbagai unsur terkait dalam masyarakat. Pemberdayaan dan partisipatif merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses dan perumusan hasil. Keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ivan Razali, "Strategi Pembangunan Masyarakat Pesisir dan Laut", *Jurnal*. Vol. 03, No.2 (Mei 2014), h. 63

<sup>39</sup>Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*,..., h. 24



## C. Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Istilah “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani yaitu ”*oikos*” dan ”*nomos*”. Artinya “tata kelola rumah tangga”. Tata-kelola itu diperlukan supaya kesejahteraan hidup rumah tangga bisa tercapai. Disini istilah “ekonomi” merujuk pada proses atau usaha pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan hidup rumah tangga.<sup>40</sup>

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mempelajari perilaku manusia yang sesuai dengan tuntutan pada landasan syariah (Al-Qur’an dan Hadist) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (*al-falah*). Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan didunia maupun akhirat. Perekonomian adalah bagian-bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak Al-Qur’an dan Hadist yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk dan coraknya.<sup>41</sup>

Tujuan ekonomi Islam adalah *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia yaitu dengan mengusahakan segala aktifitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia atau dengan mengusahakan aktivitas secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai

---

<sup>40</sup>Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 2

<sup>41</sup>Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 3

kemaslahatan dengan menghindari diri dari segala yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.<sup>42</sup>

## 2. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang diyakini dengan segenap keimanan yang akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam.<sup>43</sup> Nilai-nilai dasar ini baik nilai filosofis, instrumental maupun institusional didasarkan atas Al-Qur'an dan Hadis yang merupakan dua sumber normative dalam agama Islam.

Menurut Metwally (dalam Zaenal Arifin, 2002), prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar sebagai berikut<sup>44</sup>:

- a. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawab di akhirat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
- b. Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah
- c. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam. Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijamin oleh Allah telah menetapkan rizki setiap makhluk yang diciptakan-Nya.
- d. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari oleh sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput dan api.
- f. Seorang muslim harus tunduk pada Allah dan hari pertanggungjawaban di akhirat. Kondisi ini akan mendorong seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan

<sup>42</sup>Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar, ... h. 6

<sup>43</sup> Ahmad M Saefuddin, Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Media Dakwah dan LPPM, 2005), h. 43-49

<sup>44</sup>Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.2-3

dengan *maisir*, *gharar* dan berusaha dengan cara yang batil, melampaui batas dan sebagainya.

Ada beberapa nilai yang menjadi sumber dan dasar sistem ekonomi Islam, diantaranya:

a. Kepemilikan

Nilai dasar pemilikan dalam sistem ekonomi Islam yaitu kepemilikan terletak pada kepemilikan pemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup didunia dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam dan pemilikan perorangan tidak diperbolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak.

b. Keseimbangan

Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir dan batin diri sendiri ataupun orang lain dan lingkungan sekitarnya. Asas keseimbangan dalam ekonomi Islam terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil.

c. Keadilan

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak dan hak menikmati pembangunan.<sup>45</sup>

### 3. Fiqih Ekonomi Islam

Dalam khazanah fiqih ekonomi Islam, konsep *mudharabah*<sup>46</sup> merupakan salah satu unsur utama yang menjadi landasan atau rujukan dalam ekonomi berprinsip syariat Islam. Pelaksanaan teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik modal dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan jika mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

---

<sup>45</sup> Rozalinda, *Buku Saku Ekonomi Syariah*, (Sumatera Barat: MESS Wilayah Sumatera Barat, 2015), h. 5

<sup>46</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.224

Akad mudharabah biasanya disebut sebagai suatu transaksi pendanaan investasi yang menggunakan kepercayaan sebagai modal utamanya, seperti halnya pemilik dana memang sengaja memberikan dana kepada pengelola untuk diolah agar lebih bermanfaat dan menguntungkan. Dalam istilah ekonomi mudharabah biasa disebut *trust financing* yang memang bermodalkan kepercayaan untuk membangun sebuah transaksinya. Ada beberapa rukun mudharabah yang harus dipenuhi yaitu: pemilik dana (*shabibul maal*), pengelola dana (*mudharib*), modal (*ma'qud alaih*), usaha (*amal*) dan ijab kabul.

Jenis mudharabah dari segi kuasa yang diberikan kepada *mudharib* yaitu<sup>47</sup>:

- a) Mudharabah Muthlaqah (*Unrestricted Investment/* Investasi tidak terikat/ dana syirkah temporer) adalah *shabibul maal* memberi kuasa penuh kepada *mudharib*, untuk menjalankan proyek tanpa larangan/batasan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis perusahaan dan pelanggan.
- b) Mudharabah Muqayyadah (*Retricted Invesment/* Investasi Terikat) adalah *shabibul maal* memberikan batasan mengenai dimana, bagaimana atau untuk tujuan apa dana tersebut diinvestasikan kepada pengusaha/pengelola dana (sebagai *mudharib*) dalam mengelola dananya untuk usaha.

---

<sup>47</sup> Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah- Akad Mudharabah*, (Bandung, Fokus Media, 2013), h. 34-35

#### D. Pemberdayaan Ekonomi Islam

Pemberdayaan sosial ekonomi ialah usaha memberi pengetahuan, keterampilan serta menumbuhkan kepercayaan diri serta kemauan kuat dalam diri seseorang sehingga mampu membangun suatu kehidupan sosial-ekonomi yang lebih baik dengan kekuatan sendiri. Pemberdayaan sosial-ekonomi ini pada intinya dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan antara lain pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan dan keterlibatan berorganisasi demi menumbuhkan dan memperkuat motivasi hidup dan usaha serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan hidup dan kerja.<sup>48</sup>

Sedangkan pemberdayaan menurut Islam lebih lanjut dikatakan oleh Amrullah Ahmad dalam pengembangan Masyarakat Islam adalah sebuah sistem tindakan yang nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah umat dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan dalam perspektif Islam. Sondang P. Siagaan yang dikutip oleh Khoriddin dalam buku pembangunan Masyarakat menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat meliputi beberapa tujuan, yaitu a) Keadilan sosial, b) Kemakmuran merata, c) perlakuan yang sama dimata hukum, d) kesejateraan material, mental, dan spritual, e) kebahagiaan untuk sesama.<sup>49</sup>

Suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel.<sup>50</sup> *Pertama*, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. *Kedua*,

---

<sup>48</sup> Randy R. Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan*, (Jakarta: PT. Elex Komputindo, 2007), h.75

<sup>49</sup> Khoriddin, *Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), H. 29

<sup>50</sup> Nur Mahmudi Isma'il, *Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul*, (Bandung: ISTECS, 2001), h. 28

memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. *Ketiga*, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. *Keempat*, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri.

Pemberdayaan dibidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional.<sup>51</sup>

Menurut Imang Mansur Burhan sebagaimana dikutip oleh Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam bukunya Pengembangan Masyarakat Islam mendefinisikan pemberdayaan umat atau masyarakat sebagai upaya membangkitkan potensi umat Islam kearah yang lebih baik, baik dalam kehidupan sosial politik maupun ekonomi.<sup>52</sup>

Menurut Agus Efendi sebagaimana dikutip oleh Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam bukunya Pengembangan Masyarakat Islam, mencoba menawarkan tiga kompleks pemberdayaan yaitu: Pertama, pemberdayaan ruhaniah pemberdayaan yang diperlukan karena degradasi moral atau pergeseran nilai masyarakat Islam (*afektif*). Kedua,

---

<sup>51</sup>Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 263-264

<sup>52</sup>Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat*, ... h.42

pemberdayaan intelektual yaitu lebih menekankan pada aspek *kognitif* (pengetahuan). Ketiga, pemberdayaan ekonomi mengacu kepada pengembangan sumber daya manusia yang mandiri sehingga pemberdayaan diarahkan kepada kecakapan hidup (*life skill*) dan keterampilan berwirausaha, hal ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan menghindari manusia dari kemiskinan.<sup>53</sup>

Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Dengan demikian rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Rakyat miskin atau yang belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Pemberdayaan ekonomi dapat dilihat dari tiga sisi:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, dan setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan serta tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
- b. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
- c. Mengembangkan ekonomi masyarakat juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang.<sup>54</sup>

## E. Masyarakat Nelayan

Menurut Kusnadi dalam bukunya berjudul “Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan Perebutan Sumber Daya Perikanan penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan” nelayan dapat ditinjau dalam tiga sudut pandang, yaitu:

---

<sup>53</sup> Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat*,...h. 44

<sup>54</sup> Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*,..., h. 12



- a. Dari segi penguasaan alat-alat produksi dan alat tangkap (perahu, jaringdan perlengkapan lain), struktur masyarakat nelayan terbagi dalam masyarakat pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan produksi unit perahu, nelayan buruh hanya menggunakan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. Dalam masyarakat pertanian nelayan buruh identik dengan buruh tani. Secara kuantitatif nelayan buruh lebih besar dibanding dengan nelayan pemilik.
- b. Ditinjau dari segi skala investasi modal usahanya struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam nelayan besar dan nelayan kecil. Disebut nelayan besar karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif lebih banyak, sedangkan nelayan kecil justru sebaliknya.<sup>55</sup>

UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 1 ayat 10 yang mendefinisikan “nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan”, serta ketentuan Pasal 1 ayat 11 yang mendefinisikan “nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT)”.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan Perebutan Sumber Daya Perikanan*, (Jakarta: PT LKIS Pelangi Aksara, 2002), h. 190

<sup>56</sup> UNDANG-UNDANG PERIKANAN 2009 (UU RI NO.45 Th. 2009), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 30

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 17 ayat 2 menjelaskan pengertian nelayan tradisional yaitu nelayan yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan secara turun temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. UU ini juga menyebutkan mengenai nelayan modern dan pengusaha perikanan sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Sistem pengelolaan perikanan sangat bergantung kepada sumberdaya ikan, yang pemanfaatannya dilakukan oleh nelayan dan pembudi daya ikan.<sup>57</sup>

Dalam upaya memberdayakan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudi daya ikan, dapat dilakukan strategi pemberdayaan yang meliputi:

1. Pendidikan dan Pelatihan

Pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi juga karakteristik masyarakat setempat. Rancangan program pendidikan dan pelatihan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, ini menghindari dari ketidaksesuaian kebutuhan masyarakat tersebut dalam mengimplementasikan ilmu yang mereka dapat guna peningkatan kualitas kehidupan mereka. Keahlian dan penguasaan teknologi perikanan bagi generasi muda (terutama anak nelayan dan pembudidaya ikan) merupakan keharusan untuk menjadikan nelayan dan pembudidaya ikan sebagai pekerjaan utama yang membanggakan bagi generasi mendatang.

2. Penyuluhan dan Pendampingan

Nelayan dan pembudi daya ikan menentukan sendiri bagaimana memecahkan persoalan dalam komunitas mereka. Keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi persoalan yang ada dalam lingkungan mereka merupakan fondasi dasar dari pemberdayaan itu sendiri. Keberadaan penyuluh sebagai penumbuh semangat keswadayaan pada individu, kelompok masyarakat sangat dibutuhkan. Memberikan bantuan nelayan

---

<sup>57</sup>UNDANG-UNDANG PERIKANAN 2007 (UU RI NO. 27 Th. 2007), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 26

dan pembudi daya ikan untuk lebih mengenal dan menggali segala potensi yang ada pada diri mereka dan lingkungan tempat mereka tinggal. Mendorong individu dan masyarakat untuk mencari kesempatan-kesempatan baru dalam memperbaiki keadaannya.

3. Kemitraan usaha perikanan

Untuk mencapai peningkatan kemampuan usaha kecil menjadi mandiri dan tangguh dalam kaitannya dengan pemberdayaan, kemitraan yang dilakukan kepada nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil menjadi kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi hal tersebut. Kemitraan yang dimaksud dalam usaha perikanan adalah memberikan jalan, kesempatan serta peluang pemasaran, permodalan, peningkatan sumber daya manusia serta teknologi kepada nelayan dan pembudi daya ikan. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam membuka kesempatan usaha dari masyarakat dan kelompok nelayan dan pembudi daya ikan kecil dapat dilakukan dengan membuka kesempatan kepada pelaku usaha, pemilik kapal, lembaga pembiayaan bagi nelayan kecil, selanjutnya kerjasama kemitraan dapat dilakukan dengan pemilik lahan bagi pembudi daya ikan kecil.

4. Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Dan Permodalan

Persoalan yang akan terus menjadi persoalan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil adalah modal yang terbatas menyangkut pemenuhan sarana dan prasarana produksi perikanan. Selain itu persoalan bunga pinjaman yang cukup tinggi dan keterbatasan nelayan dan pembudi daya ikan dalam memenuhi persyaratan pengajuan kredit. Persoalan modal yang dihadapi nelayan dan pembudi daya ikan sebenarnya dapat dilakukan dengan keikutsertaan badan usaha swasta dengan memberikan sebagian keuntungannya untuk memberikan bantuan modal kepada mereka sebagai tanggung jawab perusahaan tersebut kepada masyarakat. Tentunya masyarakat nelayan dan pembudi daya ikan dalam mengelola modal tersebut dapat dilakukan dengan cara pengelolaan secara kelompok dengan pendampingan dari penyuluh agar dana tersebut dapat digunakan dengan maksimal dan bertanggung jawab.

5. Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Informasi

Ketersediaan sarana pengetahuan tentang teknologi dan informasi serta kelembagaan dalam menciptakan sumber daya manusia yang kuat tentunya menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pemberdayaan. Nelayan dan pembudi daya ikan harus ditumbuhkan kesadarannya mengenai kebutuhannya

terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang baru menyangkut mata pencahariannya.

6. Kelembagaan Nelayan Dan Pembudi Daya Ikan

Pentingnya kelembagaan yang ditaati oleh anggota komunitas nelayan dan pembudi daya ikan, sehingga kepentingan dan tujuan yang telah disepakati bersama dapat dilaksanakan dengan baik serta kapasitas lembaga atau organisasi yang memperlihatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam memobilisasi sumber-sumber daya yang tersedia guna menyelesaikan masalah-masalah dalam komunitas nelayan dan pembudi daya ikan. Hal ini tidak terlepas dari peranan individu, kelompok, pemerintah, dan organisasi atau lembaga yang tumbuh dari masyarakat.<sup>58</sup>

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kebijakan pembangunan perikanan pada masa yang akan datang hendaknya didasarkan pada landasan pemahaman yang benar tentang peta permasalahan pembangunan perikanan itu sendiri, yaitu mulai dari permasalahan mikro sampai pada permasalahan di tingkat makro yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat nelayan.

Permasalahan mikro yang dimaksudkan adalah persoalan internal masyarakat nelayan dan petani ikan menyangkut aspek sosial budaya seperti pendidikan, mentalitas, dan sebagainya. Sifat dan karakteristik tersebut dipengaruhi oleh jenis kegiatan usaha seperti usaha perikanan tangkap, usaha perikanan tambak, dan usaha pengolahan hasil perikanan.

Kelompok masyarakat ini memiliki sifat unik berkaitan dengan usaha yang dilakukannya, karena usaha perikanan sangat bergantung pada musim, harga dan pasar maka sebagian besar karakter masyarakat pesisir

---

<sup>58</sup>Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h.58

(khususnya nelayan dan petani ikan) tergantung pada faktor-faktor tersebut yaitu;

- a. Kehidupan masyarakat nelayan dan petani ikan menjadi amat tergantung pada kondisi lingkungan atau rentan pada kerusakan khususnya pencemaran atau degradasi kualitas lingkungan.
- b. Kehidupan masyarakat nelayan sangat tergantung pada musim. Ketergantungan terhadap musim ini akan sangat besar dirasakan oleh nelayan-nelayan kecil.
- c. Persoalan lain dari kelompok masyarakat nelayan adalah ketergantungan terhadap pasar. Hal ini disebabkan komoditas yang dihasilkan harus segera dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau membusuk sebelum laku dijual.

Meningkatkan produktivitas sumber daya perairan pesisir menjadi lahan perikanan yang potensial, pemerintah turut adil dalam mengupayakannya dengan berbagai langkah kebijakan yang tujuannya untuk meningkatkan produksi perikanan, pendapatan masyarakat luas, membuka lapangan usaha, meningkatkan kebutuhan konsumsi ikan untuk menambah gizi masyarakat, meningkatkan devisa negara, melestarikan sumber daya alam dan untuk memberikan dukungan terhadap pembangunan industri. Adapun kebijakan pemerintah, sebagai berikut<sup>59</sup>:

- 1) Melakukan pembinaan bagi seluruh aparat dinas perikanan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah dengan bimbingan teknis dan non teknis.
- 2) Merekomendasikan paket-paket teknologi hasil penelitian untuk dapat disebarluaskan kepada masyarakat atau pengusaha agar mereka dapat mengembangkannya dengan tujuan agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitas.
- 3) Melaksanakan bimbingan bagi masyarakat berupa penyuluhan ataupun pendidikan mengenai sarana dan prasarana budi daya ikan tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk dapat mengelola dengan baik.

---

<sup>59</sup>Kanisius, *Budi Daya Ikan Diperairan Umum*, (Yogyakarta: IKAPI, 2001), h. 9

- 4) Membangun sarana dan prasarana budi daya perikanan diseluruh wilayah indonesia, yang tujuannya untuk memudahkan nelayan dalam mendapatkan informasi atau fasilitas lainnya.

## F. Konsep Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah uang yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa.<sup>60</sup> Penghasilan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang didapatkan dari kegiatan tersebut.<sup>61</sup> Menurut Hery, pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.<sup>62</sup>

Strategi peningkatan kesejahteraan merupakan cara atau sasaran yang akan dilaksanakan oleh masyarakat guna membuat perbaikan dalam kemakmuran yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dalam menjalankan usahanya. Dimana usaha yang akan dilakukan masyarakat itu diharapkan dapat berkembang dan dapat meningkatkan taraf kehidupannya dalam hal ekonomi.

Faktor-faktor yang mendukung kesejahteraan seperti yang diungkap Usman Yatim dalam bukunya berjudul zakat dan pajak, dalam upaya peningkatan pendapatan dapat di ukur melalui faktor-faktor produksi, antara lain:

---

<sup>60</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), h. 256

<sup>61</sup> Safir Senduk, *Mencari Penghasilan Tambahan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputido, 2004), h. 14

<sup>62</sup> Hery, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.145

- a. Modal, merupakan faktor produksi yang sangat esensial bagi fakir miskin dalam proses peningkatan mutu kehidupannya.
- b. Keterampilan, merupakan faktor produksi yang sangat strategis dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Teknologi, dimanfaatkan untuk usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena teknologi juga dapat terbentuk metode baru dalam berproduksi.
- d. Lahan usaha, merupakan faktor yang sangat dibutuhkan bagi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.<sup>63</sup>

Jadi peningkatan pendapatan adalah suatu perubahan jenjang atau kondisi dari perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya dengan perolehan keuntungan yang didapat pada suatu usaha.

---

<sup>63</sup> Usman Yatim, Enny A Hendargo., *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: PT. Bina Rena, 1997), h. 243

## BAB III

### GAMBARAN UMUM

#### A. Pantai Jakat

##### 1. Letak Geografis

Pantai Jakat terletak di sebagian Kelurahan Bajak, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu lokasinya sekitar 1Km dari pusat kota Bengkulu berdekatan dengan Benteng Marlborough dan Pantai Tapak Paderi. Akses ke Pantai Jakat sangat mudah bila ingin berkunjung, sudah banyak alat transportasi dari pusat Kota Bengkulu, bisa naik taksi, angkutan umum, andong atau ojek.

**Tabel 3.1**

**Perbatasan Pantai Jakat**

<b>Batas</b>	<b>Pantai Jakat</b>
Utara	Samudera Hindia
Selatan	Kelurahan Pondok Besi
Barat	Lokasi Pantai sampai jembatan sungai hitam
Timur	Pemukiman warga, Benteng Marlborough Tapak Paderi

*Sumber:* Profil Kelurahan Bajak, 2012

Iklim di Pantai Jakat sama dengan iklim daerah-daerah lain di wilayah Indonesia pada umumnya dipengaruhi oleh iklim laut tropis. Terdiri atas dua musim, yaitu: musim hujan pada bulan November sampai dengan bulan Februari dan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Oktober yang



diselingi pancaroba yang terjadi pada bulan Maret dan Oktober, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tangkap perikanan yang ada di Pantai Jakat Kelurahan Bajak dan Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.<sup>64</sup>

## **2. Profil Pantai Jakat**

### **a. Kondisi Pantai Jakat**

Pantai Jakat adalah nama suatu wilayah terletak di Kelurahan Bajak dan Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Segara Kota Bengkulu ini menurut beberapa tokoh masyarakat setempat dikenal karena keberadaan wilayah pantainya, yang cukup menarik untuk lokasi wisata.

Pantai Jakat merupakan salah satu objek wisata dengan kelandaian 0-1.5 meter saat pasang surut dan naik. Pantai Jakat secara geografis dan topografis berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan memiliki taman bawah laut yang berbukit-bukit, memungkinkan kehidupan ikan terjaga keasrian dan habitatnya. Pantai Jakat terdapat banyak hidup berbagai habitat ikan dan hewan laut lainnya, karena banyaknya ikan sebagian besar penduduk Pantai Jakat bermata pencaharian sebagai nelayan.

Di samping sebagai nelayan ada juga sebagian penduduk yang bekerja sebagai PNS, Wiraswasta, Swasta, buruh harian lepas, karyawan honorer, pedagang, karyawan polri/TNI dan pensiunan.

---

<sup>64</sup>Profil Pantai Jakat Kota Bengkulu, data kelurahanBajak Tahun 2014

## **b. Keadaan Perekonomian**

Kondisi perekonomian Masyarakat Pesisir Pantai Jakat secara kasat mata terlihat jelas dari perbedaannya antar rumah tangga yang berkategori menengah kebawah. Hal ini disebabkan karena mayoritas mata pencaharian warga ialah nelayan, dan sebagian warga membuka usaha warung di sekitar Pesisir Pantai Jakat.<sup>65</sup>

## **B. Keadaan Umum Perikanan Laut**

### **1. Potensi Sumberdaya Ikan**

Sebagian besar (85%) Kota Bengkulu adalah perairan laut yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh perairan laut berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan terdiri dari daratan, pantai, memiliki taman bawah laut yang berbukit-bukit, memungkinkan kehidupan ikan terjaga keasrian dan habitatnya. Kota Bengkulu mencakup 9 Kecamatan dan 68 Kelurahan, dari jumlah Kelurahan tersebut sebanyak 22 Kelurahan merupakan Kelurahan Pesisir.

Hasil penelitian Direktorat Jendral Perikanan dan Balai Penelitian Perikanan lautan 2015, menyatakan bahwa perairan laut Kota Bengkulu diperkirakan mempunyai potensi lestari sumberdaya ikan laut (*Standing Stock*) teritorial sebesar 46.145 ton pertahun dan Potensi Perairan Laut ZEEI sebesar 80.071 ton pertahun dengan jenis ikan pelagis besar dan kecil, demersal dan biota laut lainnya. Jenis ikan untuk Komoditi ekspor adalah tuna, cakalang, bawal, kerapu, kakap, udang putih, udang windu,

---

<sup>65</sup>Profil Pantai Jakat Kota Bengkulu, data kelurahanBajak Tahun 2014

lobster dan teripang. Jenis ikan untuk Komoditi lainnya adalah tongkol, tenggiri, cucut, gurita, udang dogol, layur, cumi-cumi dan lain-lain.<sup>66</sup>

## 2. Unit Penangkapan Ikan

### a. Kapal Penangkapan Ikan

Sebagian besar armada penangkapan ikan wilayah perairan Pantai Jakat berukuran  $\pm$  KM 5-10 GT termasuk armada penangkapan skala kecil. Dengan demikian, jangkauan penangkapan ikan (*Fishing Ground*) nelayan hanya terkonsentrasi disekitar perairan pantai ( $\pm$  12 Mil laut).

Kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan sebagian besar masih menggunakan teknologi yang sederhana, dimana sebagian besar nelayan menggunakan perahu tanpa motor dan perahu motor tempel serta sebagian kecil menggunakan kapal motor.<sup>67</sup>

### b. Alat Tangkap Ikan

Alat tangkap yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan pada umumnya masih tergolong tradisional, hal ini terlihat dari teknologi alat tangkap yang masih sederhana belum menggunakan alat bantu mekanis. Berdasarkan jenis alat tangkap yang berkembang diketahui bahwa perkembangan penangkapan ikan masih merupakan usaha penangkapan berskala kecil yang berarti kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan masih terbatas pada perairan pantai. Adapun jenis alat tangkap adalah

---

<sup>66</sup>Data hasil penelitian Direktorat Jendral Perikanan dan Balai Penelitian Perikanan lautan, 2015

<sup>67</sup>Wawancara dengan Bapak Nurmansyah Ketua KUB Rezeki Bahari, pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 11.30 wib

Trammel Net, Gill Net, Pancing Tetap, Pancing Tonda, Pancing Lainnya, Pukat Tepi, Pukat Dogol, Pukat Payang, Pukat Cincin dan Pukat Lainnya.<sup>68</sup>

### C. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

#### 1. Sejarah Program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir)

Program ini berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, programnya yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) didirikan sejak tahun 2002. Program ini merupakan cikal bakal *holding company* koperasi nelayan yang akan memayungi aktifitas ekonomi masyarakat pesisir.

PEMP diganti nama dengan PEMPM (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Mandiri) kegiatan program ini dibawah naungan tanggung jawab Direktur Jedral Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dirjen KP3K). Berganti nama menjadi Program Pemberdayaan Usaha Mina Perdesaan (PUMP), selain itu ada beberapa program pemberdayaan lainnya Program Pemberdayaan Usaha Mina Mandiri (PUMM), Program Kapal Mina Maritim yang berbasis koperasi dan Program Asuransi nelayan. Semua program tersebut dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk mendorong kemandirian masyarakat.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Data dinas Kelautan dan Perikanan kota Bengkulu, 2016

<sup>69</sup> Wawancara bapak Ipan, staff badan penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, pada tanggal 26 April 2017 pukul 09.45 wib

## 2. Program PEMP

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir sarasannya adalah masyarakat pesisir dengan skala usaha mikro yang berorientasi pada sektor perikanan dan kelautan (penangkapan, budidaya, pengolahan dan jasa bahari). Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir salah satunya juga memberikan pembelajaran kepada nelayan diwilayah pesisir memperoleh informasi tentang lembaga keuangan untuk memfasilitasi lembaga ekonomi pembangunan pesisir.

Mengatasi permasalahan kemiskinan diwilayah pesisir dan pengembangan usaha masyarakat pesisir berbasis sumberdaya lokal, maka pemerintah melalui Departemen Dinas Kelautan dan Perikanan memperkenalkan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Program PEMP telah dilaksanakan sejak tahun 2002, pelaksanaannya dibagi 3 (tiga) periode yaitu periode inisiasi, periode institusionalisasi dan periode deversifikasi.<sup>70</sup>

PEMP merupakan cikal bakal koperasi nelayan dan merupakan salah satu jenis bantuan tidak langsung dari pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan untuk mengatasi masalah permodalan dan sosial kepada masyarakat pesisir.

PEMP secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Penggalangan Partisipasi

---

<sup>70</sup>Wawancara bapak Ipan, staff badan penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, pada tanggal 26 April 2017 pukul 09.45 wib

masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumberdaya lokal dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang program PEMP diarahkan kepada: 1) Peningkatan kemandirian masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir; 2) Peningkatan kemampuan masyarakat pesisir untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan; 3) pengembangan kemitraan masyarakat pesisir dengan lembaga swasta dan pemerintah.<sup>71</sup>

### **3. Model Strategi Program Pemberdayaan Pantai Jakat Kecamatan Teluk Sagara**

Mekanisme program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir diawali dengan model strategi pemberdayaan secara *bottom-up*, (perencanaan kegiatan dibuat, direncanakan, dilakukan, dan didapat dari masyarakat, dinas hanya memberi fasilitas), partisipatif dan transparan, kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan akan menunjuk konsultan manajemen (perguruan tinggi, konsultan professional atau LSM) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pemberdayaan masyarakat sendiri sebenarnya mengacu pada “*empowerment*”, yaitu upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam lingkup masyarakat nelayan adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal, yang mandiri, sebagai sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan

---

<sup>71</sup>Wawancara bapak Ipan, staff badan penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, pada tanggal 26 April 2017 pukul 09.45 wib

pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku (*actor*) yang menentukan hidup mereka.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people-centered development*) kemudian melandasi wawasan sumberdaya lokal (*community-based resources management*) merupakan mekanisme perencanaan *people centered development* yang menekankan pada teknologi pembelajaran social (*social learning*) dan strategi perumusan program. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan (*empowerment*) potensi ekonominya.<sup>72</sup>

Pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir ditujukan untuk pencegahan dan pengurangan angka kemiskinan, yang dilakukan dengan peningkatan produktivitas masyarakat sehingga akhirnya tercipta lapangan kerja atau wirausaha baru, dan didukung peranan lembaga-lembaga masyarakat yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir secara umum dapat dirumuskan dalam bidang: 1) Pengetahuan dan ketrampilan; 2) Permodalan; 3) Penguasaan teknologi dan manajemen; 4) Peranan lembaga keuangan dan *non* keuangan.

Model pengembangan PEMP adalah model pengembangan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui PEMPmenganut prinsip *to help them to help themselves*. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaansosial

---

<sup>72</sup>Mulyadi S, *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.51

ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya laut dan pesisir secara berkelanjutan. Program PEMP mendorong masyarakat pesisir berpartisipasi dalam setiap tahap pelaksanaan kegiatan melalui penguatan kelembagan masyarakat pesisir diperkenalkan untuk berorganisasi mulai dari sistem manajemen pengembangan usaha produktif (Kelompok Usaha Bersama /KUB) dan sumberdaya pesisir mulai dari perencanaan rencana aksi kegiatan, implementasi kegiatan, serta menumbuh kembangkan kegiatan tersebut secara berkelanjutan.<sup>73</sup>

Dalam rangka mewujudkan tujuan PEMP, pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian. Berikut model pengembangan PEMP, sebagai berikut:

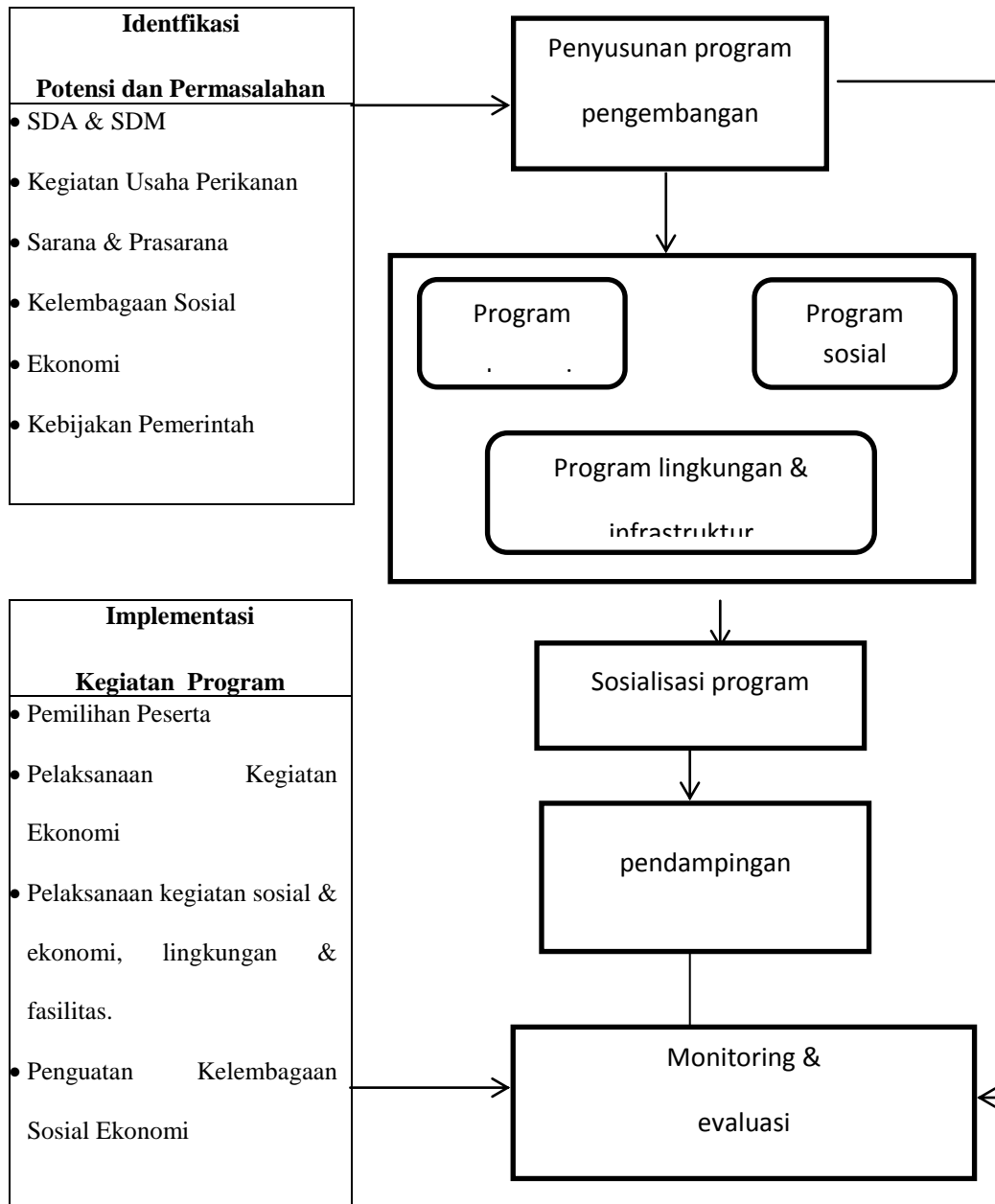
---

<sup>73</sup>Mulyadi S, *Ekonomi Kelautan*, ... h.144



Gambar 3.1

## Model Pengembangan PEMP



Sumber: Pedoman Umum PEMP 2003, Direktorat PMP DKP

Kelompok usaha bersama (KUB) perikanan adalah suatu kelompok yang melakukan kegiatan usaha dibidang perikanan berdasarkan hasil kesepakatan (musyawarah) seluruh anggota yang dilandasi oleh

kepentingan, kebutuhan dan keinginan bersama untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama. Tujuan dari KUB perikanan adalah peningkatan kemampuan usaha secara bersama dalam meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan anggota. Berikut data KUB dalam penelitian, yaitu:

a. KUB Rezeki Bahari

KUB Rezeki Bahari beralamat di jalan Enggano RT. 04 Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut. Bapak Nurmansyah (45tahun) adalah ketua KUB Rezeki Bahari. Menurut bapak Nurmansyah, KUB Rezeki Bahari didirikan pada tanggal 21 November 2010, tingkat perkembangannya dari awal sampai sekarang masih stabil.<sup>74</sup>

Adapun tujuan dari dibentuknya KUB Rezeki Bahari adalah untuk mengangkat harkat dan martabat nelayan KUB. Adapun usaha yang dikembangkan terbagi dua yaitu: pertama, pihak bapak-bapak usaha tangkap ikan. Kedua, pihak ibu-ibu bagian pengolahan, pengeringan, dan pengawetan ikan. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan adalah modal dan iklim.

b. KUB Zakat Makmur

KUB Zakat Makmur beralamat di Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Bapak Darwan Ferdhiansyah adalah ketua KUB Zakat Makmur. Menurut bapak Darwan Ferdhiansyah, KUB Zakat Makmur

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Bapak Nurmansyah Ketua KUB Rezeki Bahari, pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 11.30 wib

didirikan pada tahun 2011, tingkat perkembangannya dari awal sampai sekarang sifatnya *stagnan* (tidak ada perubahan baru).

Adapun tujuan dari dibentuknya KUB Zakat Makmur adalah untuk mengurangi pengangguran. Usaha yang dikembangkan adalah perikanan tangkap. Kendala yang dihadapi dalam usaha KUB adalah alat tangkap yang kurang memadai dan iklim.<sup>75</sup>

c. KUB Nelayan Muda Mandiri

KUB Nelayan Muda Mandiri beralamat di jalan Enggano RT.06 Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut. Bapak M. Davit (45 tahun) adalah ketua Nelayan Muda Mandiri. Menurut bapak M. Davit, KUB Nelayan Muda Mandiri mulai terbentuk awal mulanya saat bergabung dengan unit koperasi, setelah koperasi tutup maka mereka berinisiatif membentuk KUB pada bulan September 2013.<sup>76</sup>

Adapun tujuan dibentuknya KUB Nelayan Muda Mandiri adalah untuk meningkatkan pendapatan dan peralatan sendiri guna mencapai kesejahteraan. Adapun usaha yang dikembangkan terbagi dua yaitu: pertama, pihak bapak-bapak usaha tangkap ikan. Kedua, pihak ibu-ibu usaha ikan kering. Adapun Kendala yang dihadapi nelayan dalam pengembangan KUB adalah nelayan modren dengan alat tangkap trawl dan iklim.

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan Bapak Darwan Ferdhiansyah Ketua KUB Zakat Makmur, pada tanggal 30 Maret 2017 pukul 15.47 wib

<sup>76</sup>Wawancara dengan Bapak M. Davit Ketua KUB Nelayan Muda Mandiri, pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 15.25 wib

Tabel 3.2

**Penerima Dana Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan  
Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2013**

NO	Nama KUB	Alamat KUB	Pengurus dan Anggota	
1.	KUB Rezeki Bahari	Jl.Enggano RT.04 Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut	Nurmansyah (Ketua )	Ahmadsyah (Anggota)
			Edi Kasdi (Sekretaris)	Supran (Anggota)
			Zaini Daud (Bendahara)	Andi Sulaiman (Anggota)
			Arlinda (Anggota)	Tanwin (Anggota)
			Cecep Saputra (Anggota)	Arip Siswanto (Anggota)
2.	KUB Zakat Makmur	Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara	Darwan Ferdhiansyah (Ketua)	Penta Firmansyah (Anggota)
			Helmi Afrizal (Sekretaris)	Rahmat Hidayat (Anggota)
			Yakub (Bendahara)	Nurman (Anggota)
			Arfani (Anggota)	Anwar Junaidi (Anggota)
			ThamrinAnggota	Rahmadan (Anggota)
3.	KUB Nelayan Muda Mandiri	Jl. Enggano RT.06 Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut	M. Davit (Ketua)	Ramadan (Anggota)
			Chairul Yasin (Sekretaris )	Defi Hermansyah (Anggota)
			Frengky Framana P. (Bendahara)	Syahyuti (Anggota)
			Breno Cianjali (Anggota)	Jefridin (Anggota)
			Hendra Saputra (Anggota)	Muhardi (Anggota)

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2013

Dalam rangka pelaksanaan metode pemberdayaan perlu adanya kerjasama dan koordinasi antar pelaksana pembangunan yaitu masyarakat pesisir, pemerintah daerah, lembaga keuangan dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Oleh karena itu, keberhasilan program PEMP akan sangat dipengaruhi oleh berjalan atau tidaknya sistem kelembagaan yang melibatkan semua pihak.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Pertanyaan-pertanyaan pada wawancara terdiri dari dua bagian yaitu: pada bagian pertama, pertanyaan diajukan kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu seputar Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Pantai Jakat dengan menggunakan dana PUMP yang diterima Nelayan KUB. Pada bagian kedua, pertanyaan yang diajukan kepada informan Nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) seputar program Pemberdayaan dari pemerintah.

Berikut pemaparan hasil jawaban dari wawancara pada bagian Pertama membahas tentang Program Pemberdayaan di Pantai Jakat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu:

#### **1. Program Pemberdayaan, Bantuan Dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Bengkulu.**

- a. Program yang di rancang dalam memberdayakan masyarakat pesisir Pantai Jakat.

Menurut bapak Ipan staff badan penyuluhan; “Program Pemberdayaan yang di rancang oleh pemerintah untuk masyarakat pesisir khususnya Pantai Jakat adalah program PEMP melalui dana PUMP yang diberikan kepada nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB).<sup>77</sup> Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) telah dilaksanakan sejak tahun 2002. PEMP merupakan salah satu program unggulan dari departemen perikanan dan kelautan dalam rangka mengembangkan masyarakat pesisir yang mata pencarian bersumber dari eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan.”

---

<sup>77</sup>Wawancara Ipan, staff badan penyuluhan DKP kota, 26 April 2017 pukul 09.45 wib

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa program yang dirancang oleh pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya di Pantai Jakat adalah program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Program PEMP tersebut disalurkan melalui dana PUMP yang masuk ke rekening nelayan kelompok usaha bersama (KUB). Program ini menjadi wadah para KUB dalam mendapatkan bantuan penambahan modal, pengetahuan dan pengalaman dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pendapatan, meningkatkan harkat dan martabat kelompok.

- b. Bagaimana program ini dapat memberdayakan dan apakah program ini telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir ?

Menurut bapak Ipan:

“Mekanisme Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) menggunakan model strategi pemberdayaan *bottom-up*, yaitu Perencanaan kegiatannya dibuat, dirancang, dilakukan dan didapat langsung dari masyarakat dan untuk masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan hanya sebagai *fasiligator* (pemberi fasilitas). Jadi jelas bahwasannya PEMP telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir.”<sup>78</sup>

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh bapak Nurmansyah ketua nelayan KUB Rezeki Bahari<sup>79</sup>, bahwasannya program PEMP melalui dana PUMP yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat telah sesuai dan tepat sasaran.

---

<sup>78</sup>Wawancara bapak Ipan, pada tanggal 26 April 2017 pukul 09.45 wib

<sup>79</sup>Wawancara bapak Nurmansyah, pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 11.30 wib

Berdasarkan hasil keterangan tersebut, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) menggunakan model strategi pemberdayaan *bottom-up*, Perencanaan kegiatannya dibuat, dirancang, dilakukan dan didapat langsung dari masyarakat dan untuk masyarakat. Sehingga hal tersebut dirasakan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir Pantai Jakat.

c. Bagaimana proses pelaksanaan program ini ?

Menurut bapak Ipan: “Program PEMP ini rata-rata pengolahannya oleh mereka dan untuk mereka eksensinya, pengolahannya berbasis kelompok. Mereka punya lembaga yang beranggota minimal 10 orang. Mengenai program ini Ipan berpendapat ketika ditanya, bagaimana manfaat yang di rasakan pesisir dengan adanya program ini?.

Pak Ipan berpendapat bahwa “program ini cukup bahkan sangat membantu para nelayan karena bantuan yang di terima kelompok nelayan didapat mereka secara cuma-cuma, gratis tanpa harus dikembalikan, hanya saja perlu adanya bukti pertanggungjawaban laporan anggaran dasar dan hasil pendapatan mereka setiap bulannya. Bantuan dana tersebut merupakan bantuan dana PUMP (dana Hiba) yang langsung masuk ke Rekening kelompok.”<sup>80</sup>

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh bapak Darwan Ferdhiansyah ketua nelayan KUB Zakat Makmur, bahwasannya program PEMP

---

<sup>80</sup>Wawancara bapak Ipan, pada tanggal 26 April 2017 pukul 09.45 wib



melalui dana PUMP diberikan secara Cuma-Cuma yang langsung masuk ke rekening kelompok, namun ada bentuk pertanggungjawaban dari tiap kelompok seperti laporan anggaran dasar dan pendapatan kelompok perbulan.<sup>81</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, menggambarkan bahwa program yang ditawarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, sangat membantu masyarakat Pesisir Pantai Jakat khususnya nelayan KUB.

d. Apa faktor pendukung berjalannya program ini ?

Menurut Bapak Ipan: “Faktor pendukung berjalannya program ini adalah: 1) Kelembagaannya sudah berbentuk kelompok, 2) Dari sisi Pendanaan pemerintah menyiapkan, 3) Pemerintah daerah juga menyiapkan dana pendamping pada kegiatan tersebut serta pemerintah pusat ikut monitoring evaluasi dengan adanya pendampingan.”<sup>82</sup>

e. Apa hambatan ketika proses pelaksanaan pada program ini?

Menurut bapak Basaruddin pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan kota Bengkulu, “Hambatan dalam program pasti ada, namanya program bantuan tidak semua kelompok nelayan mendapat bantuan hanya beberapa kelompok mendapat bantuan.”Selama ini hambatan yang terjadi adalah:

- 1) Kelompok yang mendapatkan dana bantuan untuk yang lolos verifikasi pemikiran mereka masih beranggapan bahwa bantuan yang di berikan seolah olah hasil usaha mereka sendiri tidak ada upaya yang luar biasa dari mereka dalam memanfaatkan bantuan yang telah di terima.
- 2) Pola gaya hidup kelompok seperti Boros, tingginya tingkat konsumtif,
- 3) Managemant keuangan yang buruk.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup>Wawancara Bapak Darwan Ferdhiansyah, pada tanggal 30 Maret 2017 pukul 15.47 wib

<sup>82</sup> Wawancara bapak Ipan, pada tanggal 26 April 2017 pukul 09.45 wib

<sup>83</sup>Wawancara bapakBasaruddin, Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, pada tanggal 26 April 2017 pukul 09.45 wib

f. Prosedur, bentuk bantuan dan klarifikasi pernyataan tentang dana bantuan yang sifatnya tebang pilih.

Ibu Desi Staff Adminitrasi Bidang Hasil Tangkap, Prosedur dalam pengajuan bantuan adalah

- 1) Harus berprofesi Nelayan dan memiliki kartu Nelayan.
- 2) Memiliki kelompok atau kelembagaan yang terdiri dari minimal 10 orang dan maksimal tidak terbatas.
- 3) Berdomisilir di Kota Bengkulu
- 4) Mengajukan permohonan bantuan sesuai dengan kebutuhan kelompok.
- 5) Permohonan di verifikasi setelah itu di seleksi kelompok yang lulus seleksi di ajukan sebagai calon, maka setelah mendapatkan persetujuan, kelompok tersebut berhak mendapatkan bantuan.<sup>84</sup>

Pernyataan tersebut sama halnya dengan yang disampaikan oleh seluruh informan nelayan KUB. Dari hasil penelitian, 12 informan nelayan menyatakan hal yang tidak jauh berbeda tentang prosedur dalam mendapatkan bantuan.

Menurut bapak Nurmansyah, adapun prosedur yang dilakukan pada setiap KUB adalah

- 1) Kelompok sudah terbentuk minimal 10 orang, berprofesi sebagai nelayan dan berdomisilir di Bengkulu.
- 2) Membuat proposal sesuai kebutuhan KUB, setelah itu mengajukannya kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.
- 3) Setelah itu berkas diverifikasi dan diseleksi oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu
- 4) Pihak KUB tinggal menunggu antrian persetujuan.<sup>85</sup>

Menurut pak Ipan, “bentuk bantuan sangat bervariasi seperti bantuan uang tunai sebesar Rp100.000.000, dimanfaatkan untuk pembelian

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan Ibu Desi, Staff Adminitrasi Bidang Hasil Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, pada tanggal 26 April 2017 pukul 10.20 wib

<sup>85</sup>Wawancara dengan Nurmansyah, pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 11.30 wib

peralatan tangkap ikan. Adapun bantuan lainnya berupa Lancang, mesin dan alat tangkap.

Adapun bentuk bantuan yang diterima setiap KUB beraneka, bantuan yang diterima KUB Zakat Makmur dan KUB Rezeki Bahari mendapatkan bantuan uang kas Rp100.000.000,- sedangkan KUB Nelayan Muda Mandiri mendapatkan bantuan lancang berikut pemaparannya:

“Menurut bapak Cecep Saputra anggota KUB Rezeki Bahari, bantuan yang diterima KUB Rezeki Bahari adalah Uang tunai Rp100.000.000,- yang masuk ke rekening KUB. Uang tersebut dibagikan secara merata kepada tiap-tiap anggota KUB yang dimanfaatkan untuk membeli peralatan sesuai kebutuhan.”<sup>86</sup>

“Menurut bapak Rahmat Hidayat anggota KUB Zakat Makmur bantuan yang diterima adalah Uang tunai Rp100.000.000,- yang masuk ke rekening KUB dimanfaatkan untuk membeli peralatan sesuai kebutuhan.”<sup>87</sup> Sedangkan “Menurut bapak Muhandi<sup>88</sup> anggota KUB Nelayan Muda Mandiri, bantuan yang diterima adalah 10 lancang.”

Peneliti memberi pertanyaan seputar kabar beredar tentang dana bantuan yang sifatnya tebang-pilih. Mengenai hal tersebut bapak Ipan mengklarifikasi pernyataan tersebut, “namanya sebuah program untuk

---

<sup>86</sup>Wawancara dengan Cecep Saputra, pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 11.00 wib

<sup>87</sup>Wawancara dengan Rahmat Hidayat, pada tanggal 30 Maret 2017 pukul 15.00 wib

<sup>88</sup>Wawancara dengan Muhandi, pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 14.00 wib

mendapatkan bantuan harus diseleksi dan diverifikasi cukup ketat jadi tidak semua bisa mendapatkan bantuan. Dana bantuan Tebang-pilih tidak ada, yang ada itu keterbatasan dana. Dana bantuan terbatas jumlahnya. Lagi pula, hanya sekitar  $\pm 2\%$  nelayan di Kota Bengkulu yang belum mendapatkan bantuan.”

Berdasarkan keterangan tersebut, menunjukkan bahwa program PEMP dapat diketahui bentuk bantuannya bervariasi dan tidak ada yang namanya tebang-pilih yang ada dananya terbatas. Program tersebut ditawarkan pada masyarakat agar dapat mengenai sasaran demi kemajuan yang diinginkan bersama dan program PEMP telah berjalan dengan baik dalam memberdayakan masyarakat pesisir.

## **2. Kelompok Usaha Bersama (KUB)**

Berikut ini merupakan hasil jawaban wawancara dari pertanyaan pada Bagian kedua membahas tentang KUB dan Program Pemberdayaan dari Pemerintah. Kelompok usaha bersama (KUB) perikanan adalah suatu kelompok yang melakukan kegiatan usaha dibidang perikanan berdasarkan hasil kesepakatan (musyawarah) seluruh anggota yang dilandasi oleh kepentingan, kebutuhan dan keinginan bersama untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama. Tujuan dari KUB perikanan adalah peningkatan kemampuan usaha secara bersama dalam meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan anggota.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Mulyadi S, *Ekonomi Kelautan*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005), h.144

Berikut hasil wawancara dengan KUB seputar program pemberdayaan sebagai berikut:

- a. Pendapat tentang program pemberdayaan usaha dari dinas Kelautan dan Perikanan kota Bengkulu

“Mengenai hal tersebut bapak Izar Tobika bendahara KUB Rezeki Bahari berpendapat bahwa program Pemberdayaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu sudah tepat sasaran dan sangat membantu khususnya pada KUB ini.”<sup>90</sup>

“Menurut bapak Yakup bendahara KUB Zakat Makmur, Program pemberdayaan dari pemerintah sudah lumayan dapat membantu hanya saja perlu ditingkatkan lagi pendampingan.”<sup>91</sup>

“Menurut bapak Chairul Yasin sekretaris KUB Nelayan Muda Mandiri, program Pemberdayaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu belum tepat sasaran.”<sup>92</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat kita ketahui bahwa program PEMP melalui dana PUMP yang diterima oleh KUB sudah tepat sasaran hal ini dikarenakan Perencanaan kegiatannya dibuat, dirancang, dilakukan dan didapat langsung dari masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan hanya sebagai *fasilisator* (pemberi fasilitas). Jadi jelas bahwasannya PEMP telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir.

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Izar Tobika, pada tanggal 31 April 2017 pukul 10.10 wib

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Yakup, pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 16.00 wib

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Chaitul Yasin, pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 15.00 wib

- b. Alasan tertarik mengikuti program dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.

Dari hasil penelitian, 12 informan memberikan jawaban yang sama tentang alasan mengikuti program yang diadakan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan, seperti yang dipaparkan berikut:

“Mengenai hal tersebut bapak Darwan Ferdhiansyah berpendapat bahwa dengan mengikuti program tersebut modal kami untuk mengembangkan usaha, bisa menambah serta mendapatkan informasi terbaru dan dengan adanya program ini sedikit banyaknya membantu para nelayan khususnya yang bergabung dalam KUB.”<sup>93</sup>

- c. Cara KUB dalam pengembangan dan pemeliharaan hasil tangkap.

Dari hasil penelitian, 12 informan nelayan KUB memberikan jawaban yang sama tentang cara pengembangan hasil tangkap, berikut pemaparannya:

“Menurut bapak Nurmansyah, dalam pengembangan usaha mereka mengadakan kerjasama dengan para pengepuk dan tauke sesuai perjanjian dan aturan KUB, sedangkan pemeliharaan dengan diadakannya sistem tabungan pokok sehingga jika terjadi kerusakan alat tangkap maka ada tabungan yang bisa dipakai tanpa harus hutang.”<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup>Wawancara dengan Darwan Ferdhiansyah, pada tanggal 30 Maret 2017 pukul 15.47 wib

<sup>94</sup>Wawancara dengan Nurmansyah, pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 11.30 wib

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui dalam pengembangan usaha ikan tangkap maupun usaha pengeringan, pengasinan dan pengawetan para nelayan KUB masing bergantung kepada pengepuk dan tauke. Dalam pemeliharaan usaha para nelayan KUB sudah cukup baik karena telah melakukan budaya menabung.

d. Kendala yang dihadapi dalam memperoleh bantuan

Dari 12 informan delapan diantaranya sepakat tidak ada kendala yang dihadapi saat memperoleh bantuan. Berdasarkan hasil wawancara empat informan sepakat ada kendala, berikut pemaparannya: “Mengenai kendala bapak Arfani anggota KUB Zakat Makmur berpendapat bahwa kendala yang dihadapi adalah kurangnya koneksi sehingga saat mendaftar selalu masuk daftar tunggu serta saat ini mulai diterapkannya peraturan baru bahwa untuk mendapatkan bantuan harus memiliki legal hukum.”<sup>95</sup>

Terkait masalah peraturan baru dalam mendapatkan bantuan harus memiliki legal hukum, hal tersebut dibenarkan pak Ipan<sup>96</sup>, berikut pemaparannya: “aturan pada tahun 2017 mulai diterapkan bahwa kelompok penerima bantuan harus telah memiliki badan hukum kelompok atau koperasi”

e. Manfaat yang dirasakan sebelum dan sesudah dalam tingkat pendapatan.

---

<sup>95</sup>Wawancara dengan Arfani, pada tanggal 30 Maret 2017 pukul 14.47 wib

<sup>96</sup>Wawancara pak ipan, pada tanggal 04 Mei 2017 pukul 10.30 wib

Menurut Cecep Saputra anggota KUB Rezeki Bahari, “dengan adanya program dan bantuan tersebut ada peningkatan walau tidak terlalu.”<sup>97</sup> Mengenai hal tersebut bapak Ahmadsyah berpendapat bahwa pendapatannya standar-standar saja.<sup>98</sup>

Menurut Rahmat Hidayat anggota KUB Zakat Makmur, “manfaat yang dirasakan banyak seperti bisa mempunyai kapal baru, alat tangkap baru, penambahan modal dan peningkatan pendapatan.”<sup>99</sup>

Menurut M. Davit ketua KUB Nelayan Muda Mandiri, “peningkatannya diilustrasikan seperti ketika kita belum punya kapal sendiri kita menumpang maka kita hanya mendapatkan satu pendapatan dari 3 yang harus kita raih, maka kita hanya mendapatkan Rp50.000/hari, namun kini ada peningkatan menjadi Rp 100.000/hari, namun hal tersebut tergantung pribadi masing-masing, hanya saja pertanggungjawabannya berkelompok dibebankan dengan ketua secara langsung.”<sup>100</sup>

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dapat diketahui dengan adanya program PEMP melalui dana PUMP yang masuk ke rekening nelayan KUB manfaat yang dirasakan para nelayan KUB adalah adanya peningkatan pendapatan serta peningkatan dibidang teknologi.

f. Saran terhadap program kedepannya

Mengenai hal tersebut bapak Ramadhan anggota KUB Nelayan Muda Mandiri berpendapat bahwa diharapkan program

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan Cecep Paputra, pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 11.00 wib

<sup>98</sup>Wawancara dengan Ahmadsyah, pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 10.35 wib

<sup>99</sup>Wawancara dengan Rahmat Hidayat, pada tanggal 30 Maret 2017 pukul 15.00 wib

<sup>100</sup>Wawancara dengan M. Davit, pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 15.25 wib



kedepannya harus lebih adil, tepat sasaran, harus lebih ditingkatkan survei dan pendampingan.<sup>101</sup>

Saran lain datang dari bapak Nurmansyah Ketua KUB Rezeki Bahari, “diharapkan program tersebut terus berjalan dan kedepannya agar lebih ekstra memperhatikan KUB yang ingin maju dan perhatian terhadap kerusakan alat.”<sup>102</sup>

Menurut bapak Darwan Ferdhiansyah Ketua KUB Zakat Makmur, kedepannya untuk program ini diharapkan harus lebih ditingkatkan pendampingan terus-menerus dan dicek kembali bantuan yang telah diberikan ke KUB.<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwasannya pemberdayaan masyarakat pesisir Pantai Jakat melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dengan pemberian bantuan dana PUMP yang masuk ke rekening KUB masing-masing dalam penambahan modal. Dengan adanya penambahan modal para anggota KUB dapat meningkatkan volume usaha sehingga pendapatan meningkat.

---

<sup>101</sup>Wawancara dengan Ramadhan, pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 15.00wib

<sup>102</sup>Wawancara dengan Nurmansyah, pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 11.30 wib

<sup>103</sup>Wawancara dengan Darwan Ferdhiansyah, pada tanggal 30 Maret 2017 pukul

## B. Pembahasan

### 1. Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Jakat

Pemberdayaan masyarakat pesisir di Pantai Jakat merupakan pendekatan partisipasi masyarakat melalui metode *strategy bottom up* yang diiringi dengan peningkatan kerjasama kemitraan dana usaha pengelolaan pembangunan berkelanjutan dan transparan dimana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam rangka perencanaan dan penentu kebijakan atau dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan *bottom up* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai *fasilitator*. Sedangkan dalam pengertian dibidang pemerintahan, *bottom-up planning* atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai *fasilitator*.<sup>104</sup> Dari bawah ke atas (*bottom-up*). Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama dan mendorong keterlibatan serta komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya.

Dana bantuan program pemberdayaan pada tiga nelayan KUB di Pesisir Pantai Jakat kota Bengkulu yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan kota Bengkulu yang di transfer pada rekening KUB masing-

---

<sup>104</sup> Ivan Razali, "Strategi Pembangunan Masyarakat Pesisir dan Laut", Vol. 03, No.2 (Mei 2014), h. 63

masing, kemudian tiap-tiap KUB melalui ketua membagi dan mempergunakan dana tersebut sesuai kebutuhan anggota untuk membeli ataupun melengkapi alat tangkap yang rusak ataupun belum ada seperti lancang, mesin dan peralatan tangkap lainnya.

Berikut pemaparan dari bapak Nurmansyah ketua KUB Rezeki Bahari tentang penerapan dana bantuan program pemberdayaan “bantuan yang kami terima berupa uang kas Rp 100.000.000,- masuk ke rekening KUB. Uang tersebut dibagi rata dengan tiap-tiap anggota sebesar Rp 10.000.000,- adalah sama rata dan dana tersebut digunakan membeli perlengkapan dan peralatan alat tangkap.”<sup>105</sup> Data pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pembagian dana bantuan program pemberdayaan sama dengan tiap-tiap yang diterima anggota  $Rp\ 10.000.000 \times 10 = Rp\ 100.000.000$  pada KUB Rezeki Bahari.

Menurut bapak M. Davit ketua KUB Nelayan Muda, bantuan yang mereka terima adalah 10 lancang, jadi masing-masing lancang diberikan secara adil pada tiap-tiap anggotanya yaitu 1 lancang.<sup>106</sup>

Adapun pengeluaran dari pemanfaatan data dana bantuan program pemberdayaan di KUB Rezeki Bahari masing-masing anggota sama mendapatkan jumlah bantuan, dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>105</sup>Wawancara dengan Nurmansyah, pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 11.30 wib

<sup>106</sup>Wawancara dengan M. Davit, pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 15.25 wib

**Tabel 4.1**  
**Penerapan rencana usaha KUB**

No	Nama Anggota KUB Rezeki Bahari	Rencana Usaha/Menu	Volume	Sarana Penangkapan	
				Perahu	Mesin
1.	Nurmansyah (ketua KUB)	Pembuatan lancang:			
		Rindang pj. 6M	1 Batang	275	
		Gading-gading	40 buah	1.000	
		Papan	35 kpg	2.625	
		Kepala	1 buah	100	
		Tonggak perbos	1 buah	100	
		Papan blknng+joran2	1 set	100	
		Pisang-pisang	1 paket	150	
		Cat+baut+paku+pakalan:			
		Damar+cadik	1 paket	900	
		Serombong	1 unit	200	
		Upah tukang	Is	1.750	
		<b>jumlah</b>		<b>7.200</b>	
		Mesin merk Yamaha:			
R. 180/8PK	1 unit				
As ¾ inch+baut	1 set				
Kipas no. 9	1 unit		2.200		
			500		
			100		
		<b>Jumlah</b>	<b>2.800</b>		

(Sumber: Laporan Pengeluaran KUB Rezeki Bahari, 2014)

Dari pemaparan data dapat diketahui bahwa tidak ada penyalahgunaan dana program bantuan untuk hal-hal pribadi, hal ini karena semua dana bantuan yang masuk dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Cara pengelolaan dana bantuan program pemberdayaan menggunakan manajemen perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sehingga setiap pengeluaran selalu ada catatan dan pemantauan setiap bulannya, seperti laporan bulanan anggaran dasar bulanan dan tahunan wajib dibuat oleh bendahara tiap KUB, hal ini dijadikan bukti pertanggung jawaban atas dana bantuan yang telah mereka terima. Berikut ini adalah laporan pertanggungjawaban perkembangan usaha/anggota pada tiap-tiap KUB.

**Tabel 4.2**

**Laporan perkembangan usaha KUB Rezeki Bahari**

No	Tahun Perkembangan	Produksi	Hasil Produksi	Biaya Produksi	Pendapatan Pertahun
1.	2013	543 kg	Rp 10.065.000	Rp 3.590.000	Rp 6.475.000
2.	2014	653 kg	Rp 13.577.500	Rp 4.590.000	Rp 8.987.500
3.	2015	495kg	Rp 20.100.000	Rp 4.200.000	Rp 15.900.000
4.	2016	735kg	Rp 30.250.000	Rp 5.250.000	Rp 25.000.000

*(Sumber: laporan perkembangan KUB Rezeki Bahari)*

**Tabel 4.3****Laporan perkembangan usaha KUB Zakat Makmur**

No	Tahun Perkembangan	Produksi	Hasil Produksi	Biaya Produksi	Pendapatan Pertahun
1.	2013	653 kg	Rp 13.577.510	Rp 4.590.000	Rp 8.987.500
2.	2014	655 kg	Rp 15.835.000	Rp 6.540.000	Rp 9.295.000
3.	2015	700 kg	Rp 20.707.000	Rp 5.356.500	Rp 15.350.500
4.	2016	655 kg	Rp 26.050.000	Rp 5.550.000	Rp 20.500.000

(Sumber: laporan perkembangan KUB Zakat Makmur)

**Tabel 4.4****Laporan perkembangan usaha KUB Nelayan Muda Mandiri**

No	Tahun Perkembangan	Produksi	Hasil Produksi	Biaya Produksi	Pendapatan Pertahun
1.	2013	655 kg	Rp 15.835.000	Rp 6.540.000	Rp 9.295.000
2.	2014	722 kg	Rp 17.835.000	Rp 6.650.000	Rp 11.185.000
3.	2015	740 kg	Rp 18.752.500	Rp 5.435.500	Rp 13.317.000
4.	2016	725 kg	Rp 25.775.000	Rp 5.675.000	Rp 20.100.000

(Sumber: laporan perkembangan KUB Nelayan Muda Mandiri)

Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa dana bantuan program pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan pendapatan dan perkembangan usaha pada tiap-tiap KUB. Dalam pertanggungjawaban ada laporan dari bendahara masing-masing KUB lengkap dari pemanfaatan dalam bentuk pengeluaran dana bantuan program serta laporan hasil usaha

sebagai bukti pertanggungjawaban dalam pemanfaatan dana bantuan program PEMP dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.

Untuk mengetahui efektivitas program pemberdayaan masyarakat pesisir di Pantai Jakat, peneliti akan menguraikannya dengan menggunakan indikator efektivitas sebagai berikut:

1) Input adalah bagian dari sumber-sumber yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat nelayan.

Adapun bagian input dari penerapan program PEMP adalah

a) sosialisasi program PEMP dengan bantuan dana PUMP yang dilakukan petugas guna memberikan informasi dan pemahaman mengenai tujuan dilaksanakannya program PEMP kepada masyarakat, persyaratan yang harus dipenuhi sampai pada proses administrasi. Dengan demikian sosialisasi serta arahan tentang alur perolehan dana PUMP masyarakat nelayan buruh dan nelayan tradisional merasa sangat terbantu. Alur dan prosedur harus dilakukan para nelayan seperti membuat proposal, membuat rencana usaha dan pemanfaatan dana PUMP sesuai kebutuhan.

b) Pemberian bantuan fasilitas peralatan penangkapan ikan dan pengeringan. Dalam program PEMP, masyarakat nelayan di Pantai Jakat mendapatkan bantuan alat tangkap dan dana modal usaha. Bagi masyarakat nelayan yang tergolong buruh dan tradisional bantuan yang diterima berupa uang kas Rp 100.000.000,-, bantuan lainnya 10 unit lancang, 10 sarana tangkap ikan, mesin dan bentuk fasilitas

lainnya yang diberikan sesuai dengan data yang sudah ada sesuai dengan rancangan usaha tiap-tiap nelayan KUB.

2) Proses adalah cara bagaimana agar tujuan suatu pelaksanaan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam program tersebut. Adapun bagian proses dari penerapan program PEMP adalah

- a) Monitoring dilakukan agar dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dana bantuan yang diberikan pemerintah. Biasanya ketika dana yang diperoleh terutama dana yang diberikan secara cuma-cuma tanpa harus dikembalikan kemungkinan besar akan terjadi penyalahgunaan dana sehingga pelaksanaan monitoring harus terus dilakukan.
- b) Evaluasi diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami dalam proses pencapaian tujuan pada pelaksanaan program seperti faktor penghambat produksi ikan yaitu iklim/cuaca, modal melaut, alat tangkap dan kerusakan-kerusakan yang terjadi. Harapan kedepan evaluasi dapat dilakukan secara berkesinambungan tidak hanya di awal, hal ini bertujuan agar para petugas dan pemerintah mengetahui kendala yang dihadapi setelah memperoleh bantuan dana PUMP pada program PEMP.

3) Output adalah tujuan akhir yang akan dicapai melalui program PEMP melalui dana PUMP. Adapun bagian output dari penerapan program PEMP adalah Dana bantuan modal usaha yang sudah diberikan telah



tepat sasaran dapat dilihat dari yang memperoleh bantuan dana PUMP didomisilir nelayan yang alat tangkap dan melaut masih tergolong tradisional dan nelayan buruh.

Program PEMP mampu mencapai tujuan yaitu peningkatan pendapatan nelayan dari sebelumnya. Bantuan yang diberikan secara langsung mampu membawa rasa aman dari sisi ekonomi masyarakat melalui peningkatan pendapatan yang diperoleh para nelayan mampu menyisihkan uangnya untuk ditabung sehingga dengan tabungan yang mereka miliki berdampak pada rasa aman dan rasa kemandirian yang dimiliki masyarakat pesisir di Pantai Jakat. Kemandirian masyarakat nelayan dapat diukur dari kemampuan nelayan memberikan nilai tambah terhadap hasil tangkap yang diperoleh.

Berdasarkan hasil analisis mengenai efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) melalui dana PUMP yang dinilai dari input, proses dan output menunjukkan bahwa penerapan dan pelaksanaan program PEMP tergolong efektif serta berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat nelayan KUB.

Peneliti juga menetapkan tiga parameter indikator keberdayaan masyarakat, yaitu:<sup>107</sup> 1) Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power with*), 2) Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power to*), 3) Tingkat kemampuan membangun kerjasama dan solidaritas. Secara konseptual tiga parameter ini tersusun

---

<sup>107</sup>Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 67

secara *gradual parameterpower with* merupakan parameter paling tinggi tingkatannya dibandingkan dengan parameter lainnya. Konsep pemberdayaan masyarakat menetapkan kaidah bahwa program memberdayakan masyarakat baru dianggap berhasil ketika program tersebut mampu mewujudkan *power with* pada kelompok sasaran. Indikator *power with* menggambarkan kondisi ketika kelompok sasaran pemberdayaan mampu mengembangkan potensi keberdayaannya sendiri tetapi juga mampu memberdayakan oranglain atau keluarga di komunitasnya.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan telaah dokumentasi maka selanjutnya akan melakukan analisis terhadap penelitian dalam bentuk *deskriptif-analisis*, maka keberhasilan program pemberdayaan di Pesisir Pantai Jakat ditandai oleh beberapa parameter indikator yang digunakan, yaitu:

Pertama, pada tingkat kesadaran dan ingin berubah (*power with*) dapat dilihat dari individu-individu nelayan yang memiliki inisiatif bergabung membuat kelembagaan/kelompok yang melakukan kegiatan usaha dibidang perikanan tangkap berdasarkan hasil kesepakatan (musyawarah) seluruh anggota yang dilandasi oleh kepentingan, kebutuhan dan keinginan bersama untuk dilaksanakan dan pertanggungjawabannya juga bersama. Pembentukan KUB adalah bentuk kesadaran para nelayan untuk berubah karena adanya kepentingan bersama untuk meningkatkan usaha kelompok agar lebih maju dan berkembang.

Kedua, tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses, dalam hal tersebut para nelayan KUB mengadakan kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan kota Bengkulu dalam hal memperoleh bantuan dana. Dana yang didapat dari bantuan dana PUMP dari program pemberdayaan dimanfaatkan dalam meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses. Keberhasilan program pemberdayaan diperoleh dengan adanya penambahan modal sehingga adanya pemanfaatan dalam mengembangkan pendapatan, teknologi peralatan tangkap yang lebih baik sehingga mengalami tingkat perubahan yang lebih baik.

Ketiga, tingkat kemampuan membangun solidaritas dan kerjasama. Melalui program PEMP bantuan dana PUMP yang diterima oleh nelayan KUB mampu mengembangkan potensi memberdayakan individu, memberdayakan orang lain atau keluarga di komunitasnya. Hal tersebut juga terlihat dari adanya peningkatan, tingkat pendidikan keluarga dari anggota serta hubungan sosial dan kerjasama yang baik. Keberhasilan lainnya terlihat dari meningkatnya pendapatan yang diukur melalui tingkat modal, teknologi dan lahan usaha yang mengalami perubahan yang lebih baik.

Jadi, penelitian ini dapat mengungkapkan bahwa pendekatan *bottom-up* dalam program PEMP di wilayah Pantai Jakat sudah dilakukan dengan baik dan mampu mendorong partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan setiap program yang diterapkan.

Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan metode pemberdayaan, perlu adanya kerjasama dan koordinasi antar pelaksana pembangunan

yaitu masyarakat pesisir itu sendiri, pemerintah daerah, lembaga keuangan dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Keberhasilan program PEMP akan sangat dipengaruhi oleh berjalan atau tidaknya sistem kelembagaan yang melibatkan semua pihak.

## **2. Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Jakat Perspektif Ekonomi Islam**

Pada dasarnya Islam adalah agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Hal tersebut sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan. Pemberdayaan adalah upaya perluas horison pilihan bagi masyarakat, berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan mengadakan pilihan-pilihan.

Menurut Imang Mansur Burhan sebagaimana dikutip oleh Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam bukunya Pengembangan Masyarakat Islam mendefinisikan pemberdayaan umat atau masyarakat sebagai upaya membangkitkan potensi umat Islam kearah yang lebih baik, baik dalam kehidupan sosial politik maupun ekonomi.<sup>108</sup> Dengan demikian, pengembangan atau pemberdayaan masyarakat Islam merupakan model empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal

---

<sup>108</sup>Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2001), h.42

saleh (karya terbaik), dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat untuk melindungi, memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan didalam arena segenap aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukanlah hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata sosialnya.

Islam mewajibkan umatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja keras untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Islam juga memberikan aturan-aturan agar siapapun yang berusaha berdaya dibidang ekonomi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, yang meliputi; berimbang, realistis, berkeadilan, tanggung jawab, mencukupi dan fokus pada manusia sesuai dengan haknya sebagai khalifah di muka bumi.<sup>109</sup> Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi dalam Islam adalah adanya kesempatan anggota masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan sehingga semua orang dapat merasakan nikmat dan karunia Allah SWT.

Konsep pemberdayaan ekonomi umat Islam dalam perspektif Al-Qur'an adalah membebaskan manusia dari ketidakadilan, memberdayakan potensi manusia, menyadarkan manusia untuk peduli sesama, menuntun

---

<sup>109</sup>Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana,2007), h. 3

manusia untuk bahagia dunia dan akhirat.<sup>110</sup> Kontribusi pemberdayaan ekonomi umat Islam untuk kehidupan adalah ikut berperan serta memberantas praktek riba, memberantas praktek perdagangan manusia, monopoli kekayaan, kekuasaan yang menyebabkan kemiskinan, kelaparan dan ketakutan serta ikut memotivasi pada pribadi muslim yang kuat, tangguh, pantang menyerah, berusaha sungguh-sungguh dan pantang putus asa.

Menurut Agus Efendi sebagaimana dikutip oleh Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam bukunya Pengembangan Masyarakat Islam, mencoba menawarkan tiga kompleks pemberdayaan yaitu: Pertama, pemberdayaan ruhaniah pemberdayaan yang diperlukan karena degradasi moral masyarakat Islam (*afektif*). Kedua, pemberdayaan intelektual yaitu lebih menekankan pada aspek *kognitif* (pengetahuan). Ketiga, pemberdayaan ekonomi mengacu kepada pengembangan sumber daya manusia yang mandiri sehingga pemberdayaan diarahkan kepada kecakapan hidup (*life skill*) dan keterampilan berwirausaha, hal ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan menghindari manusia dari kemiskinan.<sup>111</sup>

Fakta pemberdayaan saat ini menuntut adanya upaya-upaya pemberdayaan ekonomi yang sistematis dan terus-menerus untuk melahirkan masyarakat yang berkualitas secara ekonomi dan sirkulasi

---

<sup>110</sup>Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam*,...h. 43

<sup>111</sup>Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam*,...h. 44

kekayaan dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata. Karenanya diperlukan terobosan ataupun metode pemberdayaan yang mengena.

Program Pemberdayaan yang dirancang oleh pemerintah di sekitar masyarakat pesisir Pantai Jakat adalah program pemberdayaan ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), pada program ini masyarakat terlibat di setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan. Demikian pula pada pascaprogram, mereka bersama-sama dengan pemerintah daerah dan mitra usaha diberikan tanggung jawab mengembangkan usaha yang telah dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Usaha yang didanai dan dikembangkan dalam program PEMP diprioritaskan pada jenis usaha yang dapat memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut serta usaha lainnya yang terkait. Program ini memberikan bantuan dengan memberikan dana PUMP yang masuk ke rekening KUB, dana bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma sesuai kebutuhan KUB, sehingga hal tersebut seharusnya mampu membangkitkan semangat kerja, meningkatkan kemampuan bidang teknologi yang tepat guna dan lebih produktif dalam pengembangan usaha.

Dalam konsep ekonomi Islam bentuk kerjasama kemitraan yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola dalam suatu usaha dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan dikenal dengan konsep mudharabah. Dalam khazanah fiqih ekonomi Islam, mudharabah merupakan salah satu unsur utama yang menjadi landasan dalam ekonomi berprinsip syariat

Islam. Pelaksanaan teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha, keuntungan menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan jika mengalami kerugian ditanggung oleh si pemilik dana.

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)

Artinya: dari Shuaib r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli dengan jangka waktu, qiradh (memberikan modal kepada seseorang untuk dikerjakan dan hasilnya dibagi dua) dan mencampurkan gandum dengan sya’ir untuk makanan dirumah, bukan untuk dijual.” Riwayat Ibnu Majah dengan sanad lemah.<sup>112</sup>

Islam memerintahkan para pemeluknya untuk saling menolong dan mempermudah urusan orang lain. Dalam hal tersebut terdapat keberkahan yang sangat besar, beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari juga dapat membawa keberkahan.

Wujud mudharabah yang utuh tersirat dimensi filosofis yang melandasinya yaitu adanya penyatuan antara modal dan usaha yang dapat membuat pemodal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) berada dalam kemitraan yang lebih *fair* serta kegiatan ekonomi ini lebih mengarah pada aspek solidaritas yang tinggi dari pemilik modal untuk dapat membantu para tenaga terampil kurang modal. Pengelola usaha tersebut membutuhkan kreatifitas dan keterampilan tertentu. Oleh karena itu kebebasan pengelola

---

<sup>112</sup> Imam Al-Hafidz dkk, *Bulughul Maram Five In One Terjemah*, (Jakarta Selatan: Noura Books PT Mizan Publika, 2008), h. 540



usaha dalam merencanakan, merancang dan mengatur usaha merupakan faktor yang menentukan. Ada beberapa rukun mudharabah yang harus dipenuhi yaitu: pemilik dana(*shahibul maal*), pengelola dana(*mudharib*), modal (*ma'qud alaih*), usaha (*amal*) dan ijab kabul.

Akad mudharabah biasanya disebut sebagai suatu transaksi pendanaan investasi yang menggunakan kepercayaan sebagai modal utamanya, seperti halnya pemilik dana memang sengaja memberikan dana kepada pengelola untuk diolah agar lebih bermanfaat dan menguntungkan. Dalam istilah ekonomi mudharabah biasa disebut *trust financing* yang memang bermodalkan kepercayaan untuk membangun sebuah transaksinya.

Salah satu ajaran Al-Qur'an yang paling penting dalam masalah pemenuhan janji dan kontrak adalah kewajiban menghormati kontrak dan janji serta memenuhi semua kewajiban. Al-Qur'an juga mengingatkan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban dalam hal yang berkaitan dengan ikatan janji dan kontrak yang dilakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al-israa':34. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Al-Qur'an menginginkan keadilan untuk terus ditegakkan dalam melakukan semua kesepakatan yang telah disetujui. Islam memandang akad sebagai sesuatu yang sangat penting karena tanpa akad yang benar dan shahih sebuah transaksi bisnis tidak menjadi sah dan halal.

Jadi, dilihat dari ketentuan dan rukun-rukun yang ada bentuk kerjasama kemitraan yang dilakukan antara pihak Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai *shahibul maal* dengan nelayan KUB sebagai

*mudharib* dalam pengembangan usaha. Bentuk kerjasama tersebut jika dikaitkan dalam fiqih ekonomi Islam merupakan bentuk kerjasama *mudharabah mutlaqah*.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan telaah dokumentasi membahas pemberdayaan masyarakat Pesisir Pantai Jakat maka selanjutnya akan menganalisis penelitian terhadap pemberdayaan masyarakat Pesisir Pantai Jakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. Ada beberapa prinsip Ekonomi Islam yang akan meninjau program pemberdayaan masyarakat pesisir Pantai Jakat yaitu program PEMP melalui dana PUMP yang masuk ke rekening nelayan KUB, selaku kelompok nelayan KUB yang menjadi objek penelitian, yaitu:

(1) Kepemilikan

Pantai Jakat Kota Bengkulu, program PEMP dengan bantuan dana PUMP berjalan dengan baik, hal tersebut terbukti dengan adanya perencanaan setiap kegiatan KUB yang menetapkan peraturan mengikuti pedoman dalam melaksanakan tugas sehingga mulai dari pemasukan dan pengeluaran nelayan KUB jelas memiliki bukti pertanggungjawaban seperti laporan penggunaan dana PUMP yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam kelompok usaha bersama (KUB) dan adanya laporan perbulan setiap pendapatan. Menurut bapak Nurmansyah ketua KUB Rezeki Bahari, “walaupun

dana bantuan pemberdayaan diberikan secara cuma-cuma tetapi ada pertanggungjawaban pemanfaatan dana tersebut.”<sup>113</sup>

Dalam pemaparan tersebut jelas bantuan program pemberdayaan dimanfaatkan dengan adanya bukti pertanggungjawaban dalam bentuk laporan sehingga tidak adanya penyalagunaan dana program pemberdayaan, semua memiliki tanggung jawab bekerja dengan jujur dan amanah. Jika dilihat dari sistem ekonomi Islam dengan menggunakan prinsip kepemilikan bahwa dapat diketahui ketua dan anggota KUB tidak menguasai dana program bantuan pemberdayaan dan tidak menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Para Nelayan KUB tetap amanah dan memanfaatkan dana PUMP yang diberikan oleh pemerintah sesuai kebutuhan para nelayan KUB dengan jujur dan amanah.

## (2) Keseimbangan dan keadilan

Para nelayan KUB telah menjalankan tugasnya dengan cara seperti mengorganisir pengelolaan dana program pemberdayaan mulai dari pemasukan hingga pengeluaran sesuai kebutuhan dan pendapatan yang mereka hasilkan.

Keseimbangan antara dana yang dimanfaatkan untuk dibelanjakan sesuai kebutuhan sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyelewengan dana. Kemudian bantuan dana program pemberdayaan dibagikan secara merata dana untuk setiap anggota KUB. Sehingga hal

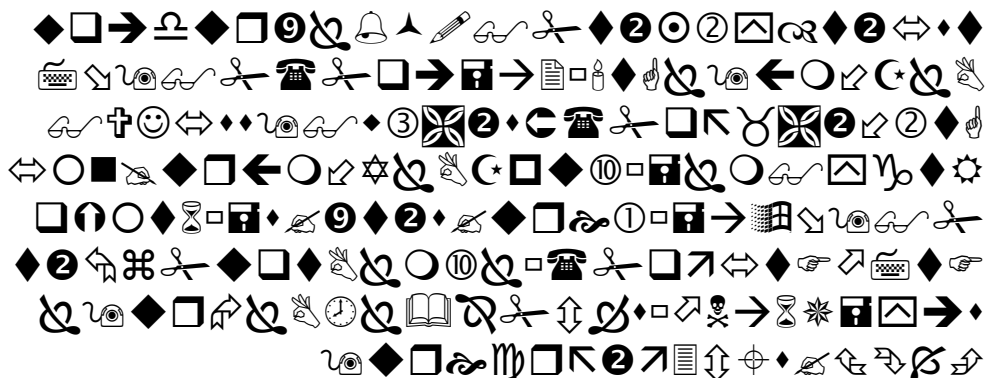
---

<sup>113</sup>Wawancara dengan Nurmansyah, pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 11.30 wib

tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu keseimbangan dan keadilan.

Dalam hal tersebut, peneliti juga meninjau program PEMP melalui dana PUMP di Pantai Jakat Kota Bengkulu melalui Ketiga konsep matra pemberdayaan Islam yang dikutip dalam buku karangan Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, yaitu:

Pertama konteks pemberdayaan rohaniyah adanya dorongan spritual untuk mempertebal keimanan nelayan bahwa apa yang dilakukan dengan bekerja di laut merupakan pengamalan dari ajaran Islam karena begitu banyaknya ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan karunia Allah di lautan, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nahl:14<sup>114</sup> yaitu:



Artinya: dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

Kedua konteks pemberdayaan intelektual dengan adanya peningkatan kemampuan khususnya dalam bidang teknologi tepat guna untuk mengelola karunia Allah tersebut agar mengejar ketinggalan umat. Sehingga dengan

<sup>114</sup>Deparement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...h. 345

adanya program pemberdayaan mampu meningkatkan kemampuan para nelayan KUB dalam upaya mengejar ketinggalan mereka dengan memanfaatkan dana bantuan dalam hal perbaikan teknologi alat tangkap yang digunakan para nelayan KUB.

Ketiga konteks pemberdayaan ekonomi tiap nelayan KUB melakukan kegiatan bermuamalah hendaknya harus mengacu pada sistem ekonomi berbasis Syariah yaitu pekerja keras dan gigih untuk mengeluarkan umat dari kemiskinan. Ini menjadi urgen karena pembangunan ekonomi dalam Islam ditegaskan berdasarkan konsep moral dan ketuhanan. Kegiatan ekonomi bersandar pada ajaran tentang halal, baik, jujur, amanah, semangat kerja, inovatif, saling mempererat tali persaudaraan dan saling mencintai antar sesama.

Dari uraian pemaparan analisa data di atas maka pemberdayaan masyarakat pesisir Pantai Jakat Kota Bengkulu yaitu program PEMP melalui dana PUMP dengan penerapan metode strategi *bottom-up* dan partisipasi telah sejalan dengan prinsip Ekonomi Islam yaitu kepemilikan, keseimbangan, pemerataan dan keadilan. Pemberdayaan tersebut juga sesuai dengan tiga kompleks pemberdayaan umat yaitu kompleks ruhaniah, intelektual dan ekonomi.

Sejumlah uraian diatas merupakan anatomi masyarakat Islam dapat dipandang sebagai upaya mencari tipe ideal dari masyarakat Islam. Jadi Secara teknis pada pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif Ekonomi Islam perlu menambah rancangan pola keuangan syariah baik perbankan

maupun *non bank* sederhana yang dapat ditumbuhkembangkan dialokasi-alokasi pusat industri dan finansial sekunder berbasis kelautan. Sistem Ekonomi Islam harus berani tampil untuk menjadi alternatif solusi finansial yang memihak dan memberikan dukungan kepada wirausahawan pemilik keahlian, kepawaian dan keterampilan disektor kelautan. Lembaga semacam ini sangat menolong pedagang dan nelayan kecil dalam meningkatkan pendapatan, karena lembaga tersebut dapat mengganti peran tauke dan tengkulak ikan di daerah perkampungan pesisir nelayan yang sering kali merupakan pemburu keuntungan yang besar (riba yang haram) yang menyengsarakan nelayan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa hasil penelitian dan pembahasan yang digunakan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Jakat

Pemberdayaan masyarakat pesisir Pantai Jakat melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dengan pemberian dana PUMP yang masuk ke rekening KUB masing-masing dalam penambahan modal pelaksanaannya menggunakan pendekatan *bottom-up* dan pola partisipasi. Dengan adanya penambahan modal para anggota KUB dapat meningkatkan volume usaha sehingga pendapatan meningkat.

Efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui dana PUMP yang dilihat dari indikator efektivitas meliputi input, proses dan output maka pelaksanaan program PEMP menunjukkan pelaksanaan pemberdayaannya tergolong efektif, serta berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan, budaya menabung, kemandirian dan nilai jual hasil tangkap masyarakat nelayan KUB di Pantai Jakat.

Keberhasilan program PEMP ditandai oleh beberapa parameter indikator yang digunakan yaitu tingkat kesadaran dan ingin berubah (*power with*), tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas memperoleh akses dan tingkat kemampuan membangun solidaritas dan kerjasama.

Indikator tersebut menunjukkan bahwa program PEMP sudah dilakukan dengan baik serta mampu mendorong kemandirian dan partisipasi masyarakat.

## 2. Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Jakat Perspektif Ekonomi Islam

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) Pantai Jakat kota Bengkulu dengan menggunakan dana PUMP merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan antara Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pemberi modal, nelayan KUB sebagai pengelola dana usaha merupakan bentuk kerjasama. Jika dihubungkan dalam konsep kerjasama dalam fiqih ekonomi Islam merupakan bentuk kerjasama *mudharabah mutlaqah*.

Penerapan dan pelaksanaan program pemberdayaan telah sejalan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip kepemilikan dilihat dari dana bantuan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi melainkan dimanfaatkan secara amanah dan sesuai kebutuhan ketua dan anggota kelompok usaha bersama (KUB). Prinsip keseimbangan dan keadilan dilihat dari dana yang dimanfaatkan untuk belanja sesuai kebutuhan sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyelewengan. Dana bantuan dibagikan secara merata dan adil sehingga tidak ada yang merasa terdzalimi. Program pemberdayaan tersebut juga telah sesuai dengan tiga kompleks pemberdayaan umat yaitu kompleks ruhaniah, intelektual dan ekonomi.



## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu:

1. Untuk mencapai keberhasilan yang semaksimal mungkin maka kedepannya perlu adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasannya dan pengendaliannya yang merupakan satu kesatuan terpadu, partisipan, dan bottom-up.
2. Pemerintah harus meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dan BUMN mulai dari aspek kedanaan, bantuan pemasaran produk perikanan dan pengelolaan produk perikanan, sehingga proyek pemberdayaan tidak berhenti setelah pemberdayaan dari pemerintah selesai.
3. Dalam pemberdayaan masyarakat pesisir perlu menambahkan rancangan pola keuangan syariah baik bank maupun non bank dalam menolong pedagang dan nelayan kecil agar dapat menggantikan peran tauke dan tengkulak ikan di perkampungan nelayan yang sering kali menyengsarakan dan merugikan pihak nelayan.
4. Bagi para akademisi hendaknya terus melakukan penelitian atau penggalian konsep-konsep yang berhubungan dengan laut dari berbagai perspektif (disiplin keilmuan) sehingga menambah khazanah pengetahuan tentang ekonomi kelautan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Anwar,. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung: Alfabeta. 2007.
- Apridar,.*Ekonomi Kelautan dan Pesisir*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Arikunto, Suharsimi.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002
- Departement Agama RI,.*Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Gema Risalah Press 1992.
- Doli. *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- Fauzia Ika Yunia, *et.al. Prinsip Dasar Ekonomi Islam perspektif Maqasyhid al-syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.
- Hery,. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press. 2010.
- Huda, Nurul, *et.al. Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Husain, Abdul., Abdullah. *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2004
- Kanisius,.*Tambak Air Payau Budidaya Udang Dan Bandeng*. Yogyakarta: IKAPI. 1998.
- Kanisius,. *Budi Daya Ikan Diperairan Umum*. Yogyakarta: IKAPI. 2001.
- Khoriddin,. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty. 1992.
- Kusnadi,.*Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan Perebutan Sumber Daya Perikanan*. Jakarta: PT LKIS Pelangi Aksara 2002.
- Kusnadi,. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Jakarta: LKIS .2006.
- Machendrawaty, Nanih, *et.al. Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung: Rosdakarya. 2001.

- Mahmudi, Isma'il, Nur. *Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul*. Bandung: ISTECS. 2001.
- Mubarok, Jaih. *Hukum Ekonomi Syariah- Akad Mudharabah*. Bandung: Fokus Media. 2013.
- Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*,: Yogyakarta: BPF. 2000.
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: PT. Rosdakarya.2004
- Mustafa, Kamal. *Bisnis Ala Nabi: Teladan Rasulullah Saw Dalam Bisnis*. Yogyakarta: PT. Bintang Pustaka. 2013.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara. 2009.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Rozalinda,. *Buku Saku Ekonomi Syariah*. Sumatera Barat: MESS Wilayah Sumatera Barat. 2015.
- Rukminto, Adi,. Isbandi. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat sebagai upaya pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- S,Mulyadi. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Saefuddin, Ahmad,.*Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Media Dakwah dan LPPM.2005.
- Senduk, Safir. *Mencari Penghasilan Tambahan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputido. 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2006.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Retika Adhitama. 2005.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Group. 2004.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005.
- Supriadi, Alimuddin. *Hukum Perikanan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Teguh Sulistyani, Ambar. *Kemitraan dan Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Gava Media. 2004.

Widodo Eko. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.

Wrihatnolo Randy R. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: PT. Elex Komputindo. 2007.

Yatim Usman, Enny A Hendargo. *Zakat dan Pajak*. Jakarta: PT. Bina Rena. 1997.

### **SKRIPSI, TESIS, JURNAL DAN UNDANG- UNDANG :**

Data dinas Kelautan dan Perikanan kota Bengkulu. 2016.

Miraza, Razak. *Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. Universitas Sumatera Utara. 2009.

Mustikaningrum, Yuniar. *Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dalam Pengolahan Hasil Ikan Di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Sidoarjo*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. 2014.

Profil Pantai Jakat Kota Bengkulu, data kelurahan Bajak Tahun 2014

Rozali Ivan. Strategi Pembangunan Masyarakat Pesisir dan Laut. Jurnal. Vol. 03 No.2. Mei 2014.

Sarjulis. *Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Tanjung Mutiara Kabupaten Agama (1970-2009)*. Skripsi. Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang. 2011.

Syafah, Mukhofifatus. *Peranan Kelompok Tani Tambak Dewi Mina Jaya Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim Di Desa Margo Mulyo Tayupati*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2015.

UNDANG-UNDANG PERIKANAN 2007 (UU RI NO. 27 Th. 2007). Jakarta:Sinar Grafika. 2007.

UNDANG-UNDANG PERIKANAN 2009 (UU RI NO.45 Th. 2009), JakartaSinar Grafika. 2009.

**INTERNET :**

Redaksi, *Dkp Kota Seleksi Kelompok Nelayan*,  
<http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2015/09/16/dkp-kota-seleksi-kelompok-nelayan>, (diposting 16 September 2015, dikutip pada tanggal 23 Mei 2016 pukul 19.14 wib).

Redaksi, *Potensi Perikanan Provinsi Bengkulu*,  
<http://bengkuluprov.go.id/potensi/perikanan>, (diposting 16 april 2014, dikutip pada tanggal 23 Mei 2016 pukul 19.14 wib).

Yasrizal, *Nelayan Pantai Zakat Keluhkan Kapal Trawl*,  
<http://kupasbengkulu.com/nelayan-pantai-jakat-keluhkan-kapal-trawl>,  
(diposting 15 juni 2014, dikutip pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 21.00 wib)

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## **DAFTAR SINGKATAN**

<b>DKP</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>KUB</b>	Kelompok Usaha Bersama
<b>P2KP</b>	Program Peningkatan Kualitas Pemukiman
<b>PEMP</b>	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
<b>PUMP</b>	Pengembangan Usaha Mina Perdesaan

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Nama : Anita Ramadhani  
Nim : 1316130112  
Prodi : Ekonomi Syari'ah  
Judul Penelitian : Pemberdayaan Hasil Perikanan Masyarakat Pesisir Pantai Jakat  
dalam Meningkatkan Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam

### **A. Informan I Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu**

1. Apa nama program yang telah dirancang dalam memberdayakan masyarakat pesisir Pantai Jakat?
2. Sejak kapan program ini diresmikan dan sudah berjalan berapa lama?
3. Bagaimana program ini dapat memberdayakan masyarakat pesisir?  
Bagaimana pola pemberdayaannya?
4. Apakah perencanaan program tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pesisir khususnya Pantai Jakat?
5. Bagaimana proses pelaksanaan program ini?
6. Apakah masyarakat pesisir dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan program ini?
7. Apakah masyarakat pesisir dilibatkan dalam penentuan tujuan dari serangkaian program?
8. Bagaimana manfaat yang dirasakan masyarakat pesisir dengan adanya program ini?
9. Apa hasil yang telah dicapai pada program ini?
10. Bagaimana cara masyarakat pesisir dalam pemeliharaan /pengembangan hasil tangkap ikan melalui program ini?



11. Bagaimana sistem pengelolaan dan penyaluran hasil tangkap ikan dalam program ini?
12. Apa faktor pendukung berjalannya program ini?
13. Apa hambatan yang ditemui ketika proses pelaksanaan pada program ini?
14. Berbicara masalah bantuan untuk Nelayan:
  - a. Bagaimana prosedur agar para nelayan mendapatkan bantuan?
  - b. Apa saja bentuk bantuan yang diterima para nelayan?
  - c. Apakah benar saat ini, untuk mendapatkan bantuan para nelayan KUB harus memiliki badan hukum?
  - d. Ada kabar beredar mengatakan bahwa bantuan untuk para nelayan sifatnya tebang pilih, bagaimana tanggapan bapak terhadap kabar tersebut? mohon diklarifikasi.

**B. Informan II “Nelayan” Tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapatkan bantuan dari program pemerintah**

**1. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB )**

- a. Kapan dibentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB ) dan bagaimana perkembangan KUB saat ini ?
- b. Apa visi dan misi serta tujuan dari Pembentukan kelompok Usaha Bersama (KUB) ini ?
- c. Jenis usaha apa yang sedang dikembangkan pada kelompok usaha ini ?
- d. Apa kendala yang dihadapi dalam mengembangkan usaha ini ?

**2. Program Pemberdayaan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bengkulu**

- a. Bagaimana pendapat bapak terhadap program pemberdayaan usaha dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bengkulu?
- b. Bagaimana prosedur dan operasional dalam mendapatkan Bantuan Program Pemberdayaan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bengkulu? Apa saja bentuk bantuan yang diterima?
- c. Apa alasan bapak tertarik mengikuti Program pemberdayaan usaha dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bengkulu? dan Apa keuntungan bapak setelah mengikuti program ini?
- d. Bagaimana cara kelompok usaha bersama ini dalam pemeliharaan dan pengembangan hasil tangkap ikan melalui program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah ?
- e. Apa kendala yang dihadapi dalam mendapatkan bantuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bengkulu?
- f. Bagaimana manfaat yang dirasakan dan adakah peningkatan pendapatan perbulan, sebelum dan sesudah mengikuti program pemberdayaan ini?
- g. Apa saran bapak terhadap program pemerintah ini kedepannya ?



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : In.11/F.IV/PP.00.9/0915 /2016

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Drs. Nurul Hak, MA  
NIP. : 196606161995031002  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Yosy Arisandy, MM  
NIP. : 19850801201403200  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Anita Ramadhani  
NIM : 1316130112  
FAKULTAS : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **PEMBERDAYAAN HASIL PERIKANAN MASYARAKAT  
PESISIR PANTAI JAKAT DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 03 November 2016  
Dekan

*(Signature)*  
Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JalanRaden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

Nomor : 0297/In.11/F.IV/PP.00.9/04/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Bengkulu, 07 April 2017

KepadaYth,  
1. Kepala DPMTSP Provinsi Bengkulu.  
2. Kepala DPMTSP Kota Bengkulu.  
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.  
di-  
BENGKULU

*Assalamu'alaikumWr.Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu TahunAkademik 2016/2017 atas nama :

Nama : Anita Ramadhani


NIM : 1316130112

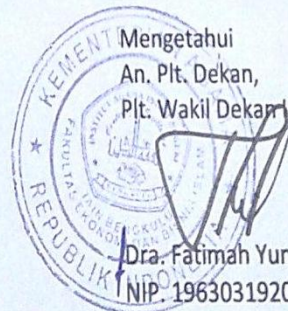
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : PEMBERDAYAAN HASIL PERIKANAN MASYARAKAT PESIR PANTAI JAKAT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.

Tempat Penelitian : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Jl. Seruni No. 27 Kota Bengkulu.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih

Mengetahui  
An. Plt. Dekan,  
Plt. Wakil Dekan  
  
Dra. Fatimah Yunus, MA  
NIP. 196303192000032003







**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Batang Hari No.108 Padang Harapan, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu Telp/Fax : (0736) 22044 SMS : 091919 35 6000  
Website: dpmpstp.bengkuluprov.go.id / Email: email@dpmpstp.bengkuluprov.go.id  
BENGKULU 38223

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/08.65/ 690 /DPMPTSP/2017

**TENTANG PENELITIAN**

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
  2. Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Nomor : 0297/In.11/F.IV/PP.00.9/04/2017, Tanggal 07 April 2017 Perihal Rekomendasi Penelitian. Permohonan Diterima Tanggal 13 April 2017.

Nama / NPM : Anita Ramadhani / 1316130112  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Maksud : Melakukan Penelitian  
Judul Proposal Penelitian : Pemberdayaan Hasil Perikanan Masyarakat Pesisir Pantai Jakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam  
Daerah Penelitian : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Jl. Seruni No. 27 Kota Bengkulu  
Waktu Penelitian/Kegiatan : 13 April s/d 13 Mei 2017  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 13 April 2017

**a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI BENGKULU**

KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I,



*Muhlis*  
**DIHARSONO, SH**  
PEMBINA TK. I

19620911 198303 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu di Bengkulu





PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
( DPM-PTSP )**

Jl. WR SUPRATMAN KEL BENTIRING PERMAI KEC. MUARA BANGKAHULU  
Telp. (0736) 349731 Fax . Telp. (0736) 349731 email : dpmpstpkotabkl@gmail.com  
KOTA BENGKULU

**IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 070/67/04/DPMPSTP.B/2017**

Dasar : Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Dengan Nomor : 503/08.65/690/DPMPSTP/2017 Tanggal 13 April 2017 .

**DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA**

Nama : ANITA RAMADHANI / 1316130112  
Pekerjaan : MAHASISWA  
Falkutas : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
Judul Penelitian : PEMBERDAYAAN HASIL PERIKANAN MASYARAKAT PESISIR PANTAI JAKAT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
Daerah Penelitian : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU JL. SERUNI NO.27 KOTA BENGKULU  
Waktu Penelitian : 13 April 2017 s/d 13 Mei 2017  
Penanggung Jawab : DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

Dengan Ketentuan : 1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.  
2. Harus mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.  
3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.  
4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 19 April 2017

a.n. WALIKOTA BENGKULU

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**TONI HARISMAN, S.Sos, M.Si**

Pembina

NIP. 19700310 199703 1 004





PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Seruni No.27 Telp.(0736) 23118. Fax.(0736) 23118 Bengkulu. Kode Pos 38224

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 523/14C/DKP/V/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : Ir. Syafrizal
- b. Nip : 196405161992 1 010
- c. Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
- d. Jabatan : Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : Anita Ramadhani
- b. NIM : 1316130112
- c. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Islam

Telah melakukan penelitian untuk keperluan penyusunan Skripsi dengan Judul/Tema "*Pemberdayaan Hasil Perikanan Masyarakat Pesisir Pantai Jakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam*" di lingkungan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu mulai tanggal 13 April sampai dengan 13 Mei 2017

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Diterbitkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 4 Mei 2017

a.n Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kota Bengkulu  
Sekretaris  
  
**IR. SYAFRIZAL**  
Pembina  
NIP.19640516 199203 1 010



## DOKUMENTASI PENELITIAN

### Observasi Awal



### Armada Kapal Nelayan





## Pengeringan Ikan



## NELAYAN KUB

### 1.1 KUB Rezeki Bahari

bersama Ketua KUB Pak Nurmansyah



### 1.2 KUB Nelayan Muda Mandiri

bersama Ketua KUB Bapak M. Davit



### **1.3 KUB Zakat Makmur**

**Bersama Ketua KUB Bapak Darwan Ferdhiansyah**



### **Pegawai Dinas Kelautan & Perikanan Kota Bengkulu**



### **Wawancara Dengan Bapak Ipan Badan Penyuluhan Perikanan**

